



Laporan Studi

Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Pendidikan Inklusi di Lombok Tengah

Juli 2019



INOVASI – Innovation for Indonesia’s School Children

Ratu Plaza Office Tower 19th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270
Indonesia

Tel : (+6221) 720 6616 ext. 304

Fax : (+6221) 720 6616

<http://www.inovasi.or.id>

Juli 2019

Foto sampul diambil dari Palladium

Pemerintah Australia dan Indonesia bermitra melalui program Innovation for Indonesia’s School Children (INOVASI). INOVASI berupaya memahami bagaimana meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam bidang literasi dan numerasi di berbagai sekolah dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Fase pertama program ini (AUD49 juta) dimulai pada Januari 2016, dan akan berlanjut hingga Desember 2019. Bekerja sama erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, INOVASI telah membentuk kemitraan dengan 17 kabupaten/kota di: Nusa Tenggara Barat; Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur; Kalimantan Utara; dan Jawa Timur.

INOVASI adalah Program Kemitraan antara Pemerintah Australia–Indonesia – Dikelola oleh Palladium.



info@inovasi.or.id



www.inovasi.or.id



www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP

Laporan Studi

Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Pendidikan Inklusi di Lombok Tengah

Juli 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	5
DAFTAR SINGKATAN	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
1. PENDAHULUAN	8
1.1 LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN PERTANYAAN STUDI	8
2. DESAIN STUDI	9
2.1 METODOLOGI.....	9
2.2 LOKASI DAN NARASUMBER STUDI.....	10
2.3 ANALISIS DAN KONTROL DATA.....	11
3. STUDI PUSTAKA	11
3.1 ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	12
3.2 HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	13
3.3 PEMAHAMAN UMUM TENTANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.....	14
3.4 PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA.....	14
4. TEMUAN STUDI	16
4.1 KEBERADAAN ABK DI LOMBOK TENGAH	16
Data ABK Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama	16
Data ABK Dinas Sosial	18
Data ABK Tingkat Desa.....	20
4.2 PEMAHAMAN DAN SIKAP TERHADAP ABK	21
Pengamatan pada Keberadaan ABK	21
Sikap terhadap ABK	23
Harapan terhadap ABK	24
4.3 AKSES ABK PADA HAK ANAK	24
Pemenuhan Hak Bermain dan Berinteraksi ABK	25
Pemenuhan Hak Mendapatkan Kasih Sayang ABK	26
Pemenuhan Hak Pengobatan ABK	27
4.4 PENDIDIKAN INKLUSI DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PADA ABK	28
Kebijakan dan Program Pendidikan Inklusi di Lombok Tengah	28
Pemahaman Aktor-Aktor tentang Pendidikan Inklusi	30
Akses ABK pada Pendidikan Inklusi	30
Kualitas Pembelajaran Pendidikan Inklusi	33
Manfaat Pendidikan Inklusi.....	35
Pendidikan Lain untuk ABK	36
Kerja Sama antar Aktor untuk Mewujudkan Pendidikan Inklusi	36
Faktor Penghambat dan Pendukung Pendidikan Inklusi dan Kehidupan ABK.....	37
5. PENUTUP	38
5.1 KESIMPULAN	38
5.2 REKOMENDASI	39
5.3 PILOT SETARA SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI	41
5.4 PENGEMBANGAN ROADMAP PENDIDIKAN INKLUSI	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 Narasumber Wawancara berdasarkan Kategori Peran.....	10
Tabel 2 Narasumber Diskusi berdasarkan Kategori Peran	11
Tabel 3 Jumlah ABK berdasarkan Jenjang Sekolah	17
Tabel 4 Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Gender	19
Tabel 5 Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Kategori Usia	19
Tabel 6 Jumlah Penyandang Disabilitas Usia SD berdasarkan Partisipasi Sekolah	19
Tabel 7 Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Kekhususan	20
Tabel 8 Pekerjaan Bapak dari ABK	26
Tabel 9 Pekerjaan Ibu dari ABK	26
Tabel 10 Kebijakan dan Program untuk Mendukung Pendidikan Inklusif di Lombok Tengah	29
Tabel 11 Penyebaran ABK berdasarkan Jenjang Pendidikan (Dapodik).....	31
Tabel 12 Penyebaran ABK berdasarkan Jenjang Pendidikan (Data Dinas Sosial)	32
Tabel 13 Perbedaan Partisipasi ABK pada Pendidikan berdasarkan Gender	33
Gambar 1 Ilustrasi Anak tentang ABK.....	21

DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Berkebutuhan Khusus
AIDS	Acquired Immunodeficiency Syndrom
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
CRPD	Convention on The Rights of Persons with Disability
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
Dinkes	Dinas Kesehatan
Dinsos	Dinas Sosial
FGD	Focus Group Discussion
GPK	Guru Pembimbing Khusus
HIV	Human Immunodeficiency Virus
INOVASI	Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KKG	Kelompok Kerja Guru
KKT	Kependidikan dan Kewenangan Tambahan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MIN	Madrasah Ibtidaiyah Negeri
ODHA	Orang dengan HIV/AIDS
Perbup	Peraturan Bupati
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Permendiknas	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokja	Kelompok Kerja
PP	Peraturan Pemerintah
PSLB	Pembinaan Sekolah Luar Biasa
RAD	Rencana Aksi Daerah
SDM	Sumber Daya Manusia
Sisdiknas	Sistem Pendidikan Nasional
SK	Surat Keputusan
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
TK	Taman Kanak-Kanak
TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
UNESCO	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UU	Undang-Undang
WHO	World Health Organization

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hampir satu dekade terakhir, Lombok Tengah sudah mendeklarasikan dirinya sebagai kabupaten inklusi. Berbagai upaya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada anak berkebutuhan khusus (ABK) sudah dilakukan, misalnya adalah dengan memperbanyak sekolah inklusi dan mengambil beberapa kebijakan pendukung lainnya seperti mengirimkan guru untuk memperoleh pendidikan inklusi tanpa gelar dan membentuk kelompok kerja inklusi. Namun demikian, data Dinas Sosial (2018) menunjukkan bahwa masih ada ABK yang tidak bersekolah.

Studi ini dilaksanakan untuk mengeksplorasi kehidupan serta kondisi ABK dan implementasi pendidikan inklusi di Lombok Tengah. Tinjauan pustaka dengan menggunakan data sekunder, wawancara, dan diskusi dilakukan untuk mendapatkan fakta lapangan. Berbagai macam aktor baik dari masyarakat, sekolah, dan pemangku kepentingan terlibat menjadi narasumber. Total narasumber untuk wawancara ada sebanyak 55 orang, sementara diskusi ada sebanyak 93 orang dengan jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Dua data sekunder utama yang digunakan adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan data Dinas Sosial.

Studi menunjukkan bahwa ABK di Lombok Tengah memiliki kekhususan yang cukup beragam. Namun demikian, ABK dengan kekhususan fisik relatif lebih mudah ditemui dan diidentifikasi. Mengacu pada definisi ABK yang dikembangkan oleh WHO, kebanyakan narasumber menggunakan pendekatan medis dalam memahami ABK di Lombok Tengah. Sikap narasumber kepada ABK umumnya adalah menerima. Purwanta (2018) menjelaskan ini sebagai pendekatan magis dimana kekhususan ABK dianggap sebagai takdir Tuhan.

Untuk menggambarkan kehidupan ABK di Lombok Tengah, studi ini menggunakan pendekatan pemenuhan hak. Meskipun di beberapa tempat hak-hak ABK, meliputi hak bermain, mendapatkan kasih sayang, pengobatan, dan pendidikan dapat terpenuhi, di banyak konteks lainnya, banyak hak ABK yang tidak dapat terpenuhi. Kemiskinan dan lingkungan yang belum suportif merupakan faktor penghambat utama pada pemenuhan hak ABK.

Implementasi pendidikan inklusi di Lombok Tengah masih belum memenuhi standar. Kebijakan untuk mendorong akses dengan memperbanyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusi—selanjutnya disebut sebagai sekolah inklusi- belum diiringi dengan kebijakan untuk mendorong penguatan ideologi inklusi, mendorong perubahan perilaku, dan mendorong peningkatan kualitas. Di banyak tempat, makna inklusi cenderung direduksi menjadi sekadar menerima siswa ABK di sekolah umum. Meskipun peningkatan kualitas masih menjadi pekerjaan rumah, pendidikan inklusi terbukti membawa manfaat bagi siswa, baik ABK maupun non-ABK terutama terkait peningkatan akses ke pendidikan bagi ABK dan keterampilan sosial bagi keduanya.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, studi ini merekomendasikan: 1) membuat rencana aksi daerah terkait implementasi pendidikan inklusi sebagai turunan dari peraturan Bupati dan peraturan lain yang lebih tinggi; 2) mendesain ulang kebijakan pengiriman guru ke Unnesa dan melengkapinya dengan program-program pendukung lainnya; 3) mengembangkan intervensi untuk level pendidikan PAUD-sederajat; 4) memperbaiki koordinasi antar lembaga, tidak hanya bertumpu pada Dinas Pendidikan; 5) melakukan penguatan pusat-pusat pendidikan inklusi seperti Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan bekerja sama dengan SLB; 6) membangun kolaborasi dengan tenaga profesional untuk melakukan asesmen; dan 7) mengembangkan program untuk mengatasi faktor non-sekolah, misalnya memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan bantuan sosial.

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran untuk semua (*learning for all*) merupakan salah satu fokus INOVASI. Ini yang menjadi dasar untuk mendorong pendidikan inklusi. INOVASI menaruh perhatian pada tiga aspek inklusi, yaitu inklusi berbasis gender, disabilitas dan etnis. Untuk aspek disabilitas, INOVASI fokus pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada di tingkatan sekolah dasar (SD). Komitmen ini jelas tertulis pada Gender Equality and Social Inclusion strategy INOVASI (2018) yang menyatakan bahwa ABK merupakan salah satu sasaran dari upaya INOVASI untuk mendorong inklusi sosial di kabupaten mitra INOVASI.

Lombok Tengah, merupakan salah satu kabupaten di mana INOVASI melaksanakan program yang secara khusus mendukung pemerintah dalam menerapkan pendidikan inklusi. Sayangnya tidak terdapat data yang cukup komprehensif yang menggambarkan kehidupan ABK dan kondisi pendidikan inklusi di Lombok Tengah. Studi ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran situasi dan kondisi ABK di Lombok Tengah dan bagaimana pendidikan inklusi dilaksanakan. Bagian ini menjelaskan latar belakang studi secara lebih detail dan beberapa pertanyaan utama yang berusaha dijawab melalui studi ini.

1.1 LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN PERTANYAAN STUDI

Dalam satu dekade terakhir, pendidikan inklusi menjadi agenda di banyak kabupaten/kota. Upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih ramah untuk ABK mulai diimplementasikan di banyak daerah. Usaha ini tidak lepas dari terbitnya dua aturan nasional yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang (UU) No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70/2009 tentang Pendidikan Inklusi.

Salah satu pemerintah kabupaten yang sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah kabupaten Lombok Tengah. Pada tanggal 24 September 2012, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Inklusi. Di tahun berikutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 39/2013 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Peraturan ini merupakan payung hukum utama di level kabupaten terkait pelaksanaan pendidikan inklusi di Lombok Tengah.

Data dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bertanggung jawab untuk isu pendidikan inklusi, menunjukkan bahwa dari 223 sekolah inklusi yang ada di Nusa Tenggara Barat, 127 atau hampir 60% ada di Lombok Tengah (INOVASI, 2018). Selain melakukan penunjukan sekolah inklusi, pemerintah Lombok Tengah juga sudah mengimplementasikan beberapa inisiatif lainnya seperti pengiriman guru untuk mengikuti KKT (Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan)¹ untuk belajar tentang pendidikan inklusi dan pembuatan kelompok kerja inklusi di kabupaten. Namun demikian, belum ada studi atau evaluasi tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan sejauh mana program-program tersebut berdampak pada kehidupan ABK, khususnya pendidikannya.

Data Dinas Sosial kabupaten Lombok Tengah justru menunjukkan bahwa masih banyak penerima bantuan Dinas Sosial usia sekolah yang sama sekali tidak pernah pergi ke sekolah dan saat ini tidak bersekolah. Fakta ini mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya oleh UNESCO (2018), Adioetomo, Mont, & Irwanto (2014), dan WHO & World Bank (2011) yang menunjukkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas sangat rentan untuk tidak bersekolah.

¹ Selanjutnya disebut sebagai guru KKT

Studi ini dilaksanakan untuk mengeksplorasi kehidupan ABK di Lombok Tengah dan bagaimana pendidikan inklusi dilaksanakan. Hasil studi ini diharapkan dapat menggambarkan fakta-fakta tentang kehidupan ABK, khususnya pendidikan ABK pada pemangku kepentingan di Lombok Tengah. Untuk internal INOVASI, selain memperkaya pustaka untuk topik inklusi yang dapat menjadi diskursus di masa yang akan datang, studi ini juga diharapkan mampu memberikan masukan terkait desain program pendidikan inklusi, baik yang sedang dijalankan di Lombok Tengah ataupun nantinya untuk wilayah-wilayah lain.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah disampaikan sebelumnya, studi ini dilengkapi dengan beberapa pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana keberadaan ABK di Lombok Tengah?
2. Bagaimana pemahaman dan sikap masyarakat terhadap ABK di Lombok Tengah?
3. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak ABK oleh penyelenggara negara di Lombok Tengah?
4. Bagaimana implementasi pendidikan inklusi dilaksanakan di Lombok Tengah?
5. Apa saja faktor-faktor pendukung sekaligus penghambat kehidupan ABK dalam proses pendidikan inklusi di Lombok Tengah?
6. Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di Lombok Tengah?

2. DESAIN STUDI

Bagian ini menggambarkan tiga hal utama yang menjadi desain dalam penelitian ini. Pertama adalah metodologi yang digunakan dalam studi ini. Selanjutnya adalah narasumber serta lokasi pelaksanaan studi. Terakhir adalah tentang teknis analisis data dan bagaimana kontrol terhadap kualitas data di studi ini dilaksanakan.

2.1 METODOLOGI

Pendekatan utama yang digunakan di studi ini adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan utama untuk melakukan eksplorasi pada sebuah isu, dalam hal ini adalah isu pendidikan inklusi dan ABK. Terdapat tiga metode utama yang digunakan untuk melakukan eksplorasi guna menjawab pertanyaan penelitian, yaitu melalui kajian pustaka, wawancara terstruktur dan diskusi terpimpin (FGD).

Kajian pustaka dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen relevan yang digunakan oleh INOVASI dalam memahami ABK. Selain itu, dokumen lain yang menjadi sumber adalah produk-produk kebijakan terkait pendidikan inklusi baik di level nasional maupun di level kabupaten. Data sekunder lain yang digunakan dan menjadi acuan dalam studi ini adalah data ABK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan data sebaran ABK milik Dinas Sosial.

Selanjutnya, wawancara terstruktur dan diskusi terpimpin dilakukan untuk mengeksplor respon-respon yang tidak dapat dihasilkan melalui analisis data sekunder. Kedua metode ini juga dilakukan untuk mengonfirmasi temuan awal dari data sekunder. Wawancara dan diskusi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yaitu siswa ABK, siswa non-ABK, orang tua, masyarakat, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pemangku kepentingan. Bagian selanjutnya membahas lebih detail tentang aktor-aktor tersebut.

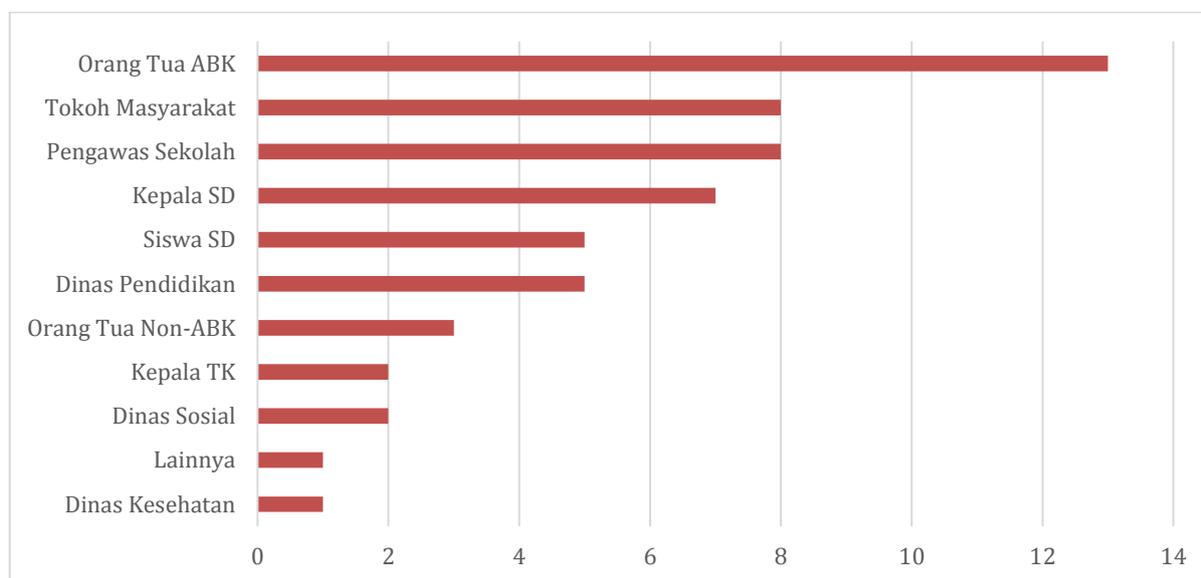
2.2 LOKASI DAN NARASUMBER STUDI

Dari 12 kecamatan yang ada di Lombok Tengah, studi ini dilaksanakan di enam kecamatan sebagai lokasi penelitian. Kecamatan tersebut dipilih secara *purposive*, dimana lokasi tersebut merupakan daerah intervensi INOVASI. Dari setiap kecamatan, INOVASI memilih satu SD, yang merupakan SD mitra INOVASI, dan satu TK. Pelibatan TK dirasa penting karena idealnya pendidikan inklusi dimulai sedini mungkin. Pemilihan SD mitra INOVASI yang terlibat di dalam studi ini juga dilakukan dengan menggunakan Dapodik, yang dapat menunjukkan penyebaran siswa ABK.

Selanjutnya, pemilihan narasumber di dalam studi ini dilaksanakan secara *purposive*. Terdapat tiga kriteria utama yang dilakukan dalam memilih narasumber yaitu keterwakilan peran, perannya relevan dengan isu yang sedang diteliti, dan mampu secara lisan maupun tulisan untuk terlibat di dalam diskusi atau wawancara. Untuk narasumber ABK, pengambilan data dilakukan bersama dengan orang tua/wali guna mempermudah komunikasi dan memberi rasa nyaman kepada narasumber.

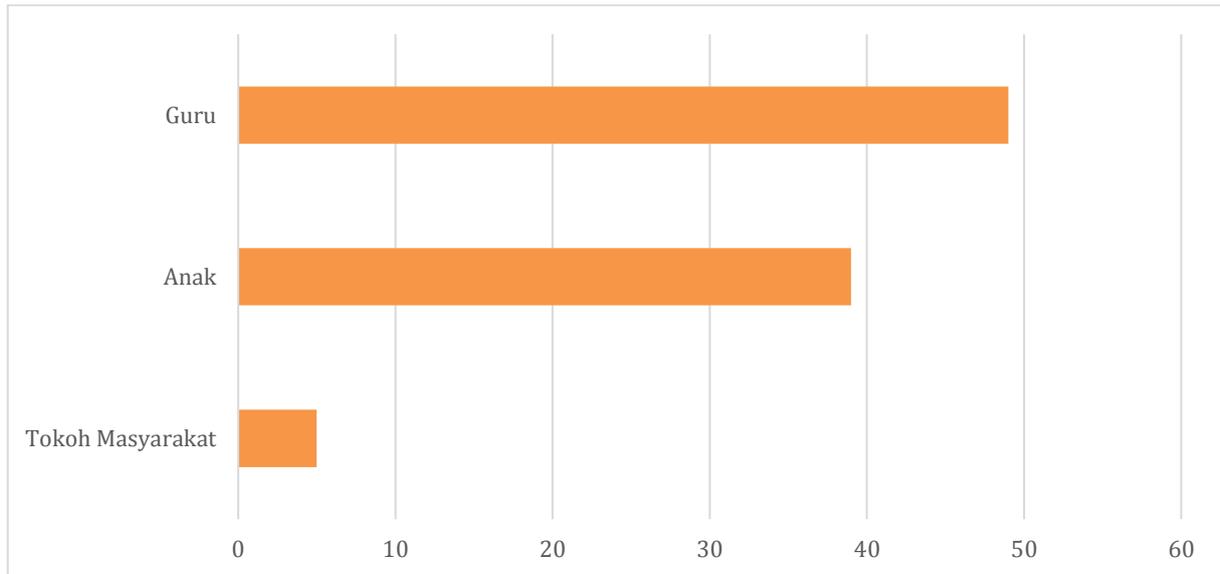
Terdapat 55 orang yang terlibat di dalam wawancara, yang terdiri dari 33 responden laki-laki dan 22 perempuan. Berikut ini adalah detail peran narasumber dalam wawancara:

Tabel 1 Narasumber Wawancara berdasarkan Kategori Peran



Untuk diskusi kelompok terarah (FGD), terdapat 93 narasumber yang terlibat. Terdiri dari 48 peserta laki-laki dan 45 perempuan. FGD dilakukan kepada siswa, guru, dan tokoh masyarakat. FGD siswa dilaksanakan sebanyak delapan diskusi, guru SD dan guru TK dilaksanakan masing-masing delapan dan tiga kali, sementara diskusi tokoh masyarakat dilaksanakan sebanyak dua kali. Berikut ini adalah detail peran narasumber dalam diskusi:

Tabel 2 Narasumber Diskusi berdasarkan Kategori Peran



2.3 ANALISIS DAN KONTROL DATA

Dalam melakukan analisis data, triangulasi dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, triangulasi metodologi yang dilakukan dengan membandingkan temuan yang didapat saat wawancara, diskusi (FGD), dan analisis data sekunder. Selanjutnya adalah triangulasi narasumber yang dilakukan dengan membandingkan temuan dari narasumber yang berbeda. Kemudian adalah triangulasi peneliti yang dilakukan dengan mengonfirmasi masing-masing temuan dari peneliti atau pengambil data yang berbeda. Terakhir adalah triangulasi lokasi yang dilakukan dengan membandingkan temuan di konteks berbeda.

Untuk mengontrol kualitas hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang juga sudah dilakukan. Pertama adalah mengadakan pelatihan untuk menyamakan persepsi terkait dengan tujuan penelitian dan instrumen yang digunakan. Di dalam pelatihan, semua peneliti juga dibekali dengan pemahaman awal tentang ABK melalui berbagai literatur studi dan data sekunder terkait ABK serta pemahaman dan konsep tentang pendidikan inklusi di Lombok Tengah. Selanjutnya adalah ulasan oleh ahli pendidikan inklusi atas laporan yang sudah disusun berdasarkan temuan studi. Ahli tersebut memberikan umpan balik dan masukan teknis yang diperlukan untuk memastikan kualitas data dan interpretasi data, terutama pemahaman dan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi.

3. STUDI PUSTAKA

Bagian ini memaparkan definisi anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi yang diambil dari beberapa sumber relevan. Penggunaan beberapa sumber menjadi penting untuk mengetahui bahwa ABK dan pendidikan inklusi memiliki makna yang luas dan bisa jadi beragam untuk organisasi yang berbeda. Keragaman definisi tersebut menunjukkan bahwa isu ABK, termasuk juga pendidikan inklusi, terus berkembang. Selain karena temuan-temuan baru yang lebih relevan, makin banyaknya praktik-praktik pelayanan pada ABK juga membuat definisi-definisi tersebut terus mengalami pergeseran.

3.1 ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Terdapat dua pendekatan umum dalam mendefinisikan ABK yaitu pendekatan medis dan pendekatan sosial (WHO & World Bank, 2011). Pendekatan medis (*medical model*) menekankan bahwa kekhususan pada ABK terjadi karena faktor medis dan fisik anak tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, anak-anak yang memiliki keterbatasan penglihatan, pendengaran, gerak, dan sejenisnya dapat dianggap sebagai penyandang disabilitas atau ABK. Pendekatan ini yang banyak dimiliki oleh orang-orang umum dalam mendefinisikan ABK.

Selain pendekatan medis, WHO juga memperkenalkan pendekatan lain dalam memahami ABK yaitu pendekatan sosial (*social model*). Pendekatan ini menawarkan definisi ABK yang lebih luas dibandingkan pendekatan medis. Menurut pendekatan ini, penyandang disabilitas tidak terbatas pada orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik (*internal factor*) melainkan juga orang-orang yang menjadi terbatas karena lingkungan yang kurang suportif (*external factor*). Jika menggunakan definisi tersebut maka anak-anak dari golongan ekonomi kurang mampu, maupun anak-anak yang menggunakan bahasa ibu yang berbeda dengan yang umum digunakan di kelas, dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Pendekatan ini memandang disabilitas sebagai hasil dari ketidakmampuan lingkungan untuk mengadaptasi kebutuhan individu, bukan karena kondisi fisik individu.

Sebagai jalan tengah, WHO menawarkan pendekatan *biopsychosocial model* yang mempertimbangkan faktor medis dan sosial dalam memahami disabilitas (WHO & World Bank, 2011). Kutipan di bawah adalah definisi disabilitas oleh WHO. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa WHO mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan struktur atau fungsi tubuh, keterbatasan untuk beraktivitas, dan hambatan untuk berpartisipasi.

“Disabilities is an umbrella term, covering impairments, activity limitations, and participation restrictions. An impairment is a problem in body function or structure; an activity limitation is a difficulty encountered by an individual in executing a task or action; while a participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situations.”

Definisi disabilitas oleh WHO sebetulnya mengakar pada definisi disabilitas yang pernah disepakati saat Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas)². Melalui forum tersebut disepakati bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensoris yang berinteraksi dengan beberapa hambatan lainnya dan berpotensi menghambat partisipasi mereka secara efektif dan penuh kepada masyarakat.

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti yang tertulis di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70/2009, mendefinisikan ABK sebagai anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Dibandingkan dengan kedua definisi sebelumnya, definisi ini memiliki dua perbedaan utama. Pertama, kata ‘kelainan’ dalam definisi yang digunakan pemerintah Indonesia mengesankan ABK menjadi lebih negatif dibandingkan dengan definisi sebelumnya yang menggunakan kata ‘keterbatasan’ dan ‘berbeda’. Selanjutnya, definisi oleh pemerintah Indonesia ini tidak saja memasukkan klasifikasi kekhususan yang menggambarkan kerentanan anak melainkan juga kekhususan yang menjadi kelebihan anak, yaitu anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Selain definisi tersebut, ada definisi lain yang juga digunakan pemerintah Indonesia dalam memahami disabilitas. Melalui penerbitan Undang-Undang (UU) No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik,

² An international human rights treaty of the United Nations intended to protect the rights and dignity of people with disabilities

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berbeda dengan Permendiknas No.70/2009, regulasi yang relatif lebih baru ini juga menekankan pada hambatan dan kesulitan berpartisipasi pada masyarakat. Definisi ini lebih sejalan dengan definisi yang dikembangkan oleh WHO.

Berbagai macam definisi terkait disabilitas dan ABK ini digunakan untuk menganalisis temuan-temuan yang didapatkan di Lombok Tengah. Meskipun definisi yang digunakan Permendiknas mungkin dominan muncul, menarik untuk melihat sejauh mana definisi WHO dan UU yang relatif baru digunakan oleh aktor-aktor penting di Lombok Tengah dalam memahami ABK.

3.2 HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Sama halnya dengan anak-anak pada umumnya, hak-hak ABK juga dijamin pemenuhannya. Upaya ini sudah berlangsung sejak awal tahun 1980-an. Beberapa dokumen internasional sudah dihasilkan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi ABK dapat dipenuhi, misalnya World Programme of Action Concerning Disabled People (1982), the Convention on the Rights of the Child (1989), and the Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for People with Disabilities (1993). Penerbitan dokumen tersebut menjadi agenda internasional yang mendorong negara-negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemenuhan hak anak, khususnya anak dengan kekhususan.

Salah satu dokumen yang paling mutakhir yang menggambarkan hak-hak penyandang disabilitas adalah dokumen hasil CRPD (Convention on The Rights of Persons with Disability). Berikut ini adalah hak-hak penyandang disabilitas yang ada di dokumen tersebut:

1. Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh autonomi dan kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri.
2. Tidak mendapatkan diskriminasi.
3. Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di masyarakat.
4. Mendapatkan penerimaan.
5. Mendapatkan kesempatan yang seimbang.
6. Mendapatkan akses.
7. Mendapatkan kesempatan yang setara, untuk laki-laki dan perempuan.
8. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan menampilkan identitasnya.

Di Indonesia, hak penyandang disabilitas tertulis di pasal 2 UU No.8/2016. Hak-hak yang dijamin pemerintah Indonesia ini mengacu pada hak penyandang disabilitas yang tertulis di CRPD. Berikut ini adalah hak-hak penyandang disabilitas yang dijamin pemerintah yaitu hak untuk hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Meskipun studi ini lebih banyak fokus pada eksplorasi hak ABK pada pendidikan, bagian penjabaran digunakan untuk melihat sejauh mana hak-hak ABK lainnya terpenuhi juga di Lombok Tengah, yakni hak perlindungan, hak kesehatan, hak tumbuh kembang oleh pemangku kepentingan. Studi ini juga menggambarkan sejauh mana aktor-aktor yang terlibat dalam studi ini mengenali hak tersebut dan bagaimana hak tersebut dapat diakses oleh ABK.

3.3 PEMAHAMAN UMUM TENTANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Menurut Purwanta (2018), pakar anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi, terdapat tiga pendekatan dalam menyikapi keberadaan ABK, yaitu pendekatan magis, naif, dan kritis. Purwanta, yang merupakan penyandang disabilitas sekaligus akademisi, mengembangkan tiga pendekatan tersebut dengan mengacu pada teori kesadaran yang dikembangkan oleh Paulo Freire.

Berikut ini adalah masing-masing penjelasan untuk ketiga pendekatan tersebut:

1. Pendekatan Kesadaran Magis. Pendekatan ini menganggap kekhususan pada ABK disebabkan karena alasan-alasan magis, seperti takdir Tuhan, kutukan akibat kesalahan orangtua, gangguan roh halus, dan sejenisnya (terjadi secara magis karena keterbatasan kemampuan rasionalitas). Orang-orang dengan pendekatan ini memandang bahwa tindakan yang perlu dilakukan terhadap ABK agar mereka menjadi sehat adalah dengan beramal, bersedekah, dan memohon ampunan. Tujuan dari pendidikan yang diberikan kepada ABK adalah untuk mempersiapkan ABK menjadi hamba atau umat Tuhan yang saleh. Dalam studi ini pendekatan magis akan disebut juga sebagai pendekatan *traditional model of disability*.
2. Pendekatan Kesadaran Naif. Pendekatan ini menganggap disabilitas terjadi karena persoalan medis, misalnya penyakit, keturunan, kecelakaan, dan penuaan. Kekurangan fisik dan mental dianggap sebagai penyebab utama seseorang menjadi lemah, tidak mampu, tidak berdaya, dan sejenisnya. Kegiatan yang umumnya dilakukan untuk menangani ABK lebih bersifat rehabilitatif, misalnya rehabilitasi fisik, sosial, dan vokasional, agar orang dengan kebutuhan khusus mempunyai keterampilan dan mampu bersaing dengan orang lain untuk keberhasilan hidupnya. Pendekatan naif ini identik dengan pendekatan *medical model of disability*.
3. Pendekatan Kesadaran Kritis. Pandangan ini menekankan bahwa kekhususan yang terjadi pada ABK disebabkan karena adanya proses marginalisasi dan pembatasan ABK terhadap akses untuk memperoleh hak asasinya. Orang-orang dengan pandangan ini cenderung akan melakukan advokasi agar ABK dapat memperoleh hak-haknya. Pendidikan dianggap bertujuan untuk mempersiapkan ABK sebagai manusia seutuhnya yang dapat hidup di masyarakat secara integral sebagai makhluk individu maupun sosial. Pendekatan ini identik dengan pendekatan *social model of disability*.

Ketiga pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana sikap serta pandangan orang-orang terhadap keberadaan ABK di Lombok Tengah. Oleh karena setiap pandangan di atas memiliki kaitan dengan bagaimana orang-orang bertindak atau memperlakukan ABK, maka pendekatan di atas juga dapat digunakan untuk menilai bagaimana sikap dan perilaku masyarakat di Lombok Tengah terhadap ABK.

3.4 PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA

Pelaksanaan pendidikan inklusi merupakan salah satu reaksi dari banyaknya kritik terhadap segregasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara dalam memberikan akses pendidikan pada ABK. Selama ini, ABK ditempatkan di sekolah yang berbeda dengan siswa non-ABK. Selain berada pada tempat yang berbeda, siswa ABK juga mendapatkan pendidikan yang berbeda dengan siswa-siswa lainnya. Hal ini dianggap justru akan mempertajam perbedaan yang sudah ada antara siswa ABK dengan siswa non-ABK. Lebih jauh, pendidikan model ini berpotensi untuk menggagalkan usaha pemerintah untuk bisa mempersiapkan ABK berpartisipasi penuh di masyarakat.

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994) merupakan salah satu landasan awal terlaksananya pendidikan inklusi di Indonesia (Suparno, 2008). Dokumen tersebut menyatakan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara inklusif dimana seluruh anak, lepas dari berbagai macam kondisinya, baik kerentanan fisik maupun sosial berhak memperoleh pendidikan yang sama.

“Schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised areas or groups.”

Menurut Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994) terdapat beberapa prinsip fundamental dalam pendidikan inklusi, yaitu:

1. Siswa di sekolah inklusi harus belajar bersama.
2. Sekolah inklusi harus mengenali dan merespon kebutuhan siswa yang berbeda.
3. Sekolah inklusi harus mengakomodasi perbedaan gaya dan kemampuan belajar siswa yang berbeda.
4. Sekolah inklusi harus memastikan kualitas pendidikan inklusi melalui penjaminan mutu kurikulum, organisasi sekolah, strategi mengajar guru, sumber daya sekolah, dan kerja sama dengan masyarakat.

Di Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20/2003 sudah menjamin pendidikan yang berkualitas untuk ABK. Secara spesifik, melalui penerbitan Permendiknas No. 70/2009 tentang Pendidikan Inklusi, pemerintah mendefinisikan pendidikan inklusi sebagai:

“Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”

Definisi tersebut sejalan dengan yang dimaksud Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Semenjak terbitnya Permendiknas, banyak daerah-daerah di Indonesia mulai mengimplementasikan pendidikan inklusi.

Komitmen pemerintah untuk memastikan terpenuhinya pendidikan untuk penyandang disabilitas juga tertuang di dalam pasal 40 UU No. 8/2016. Berikut ini adalah kewajiban pemerintah:

1. Memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus.
3. Mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
4. Mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
5. Memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
6. Menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
7. Menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Meskipun semangat dan upaya untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi sudah terjadi lebih dari sepuluh tahun di Indonesia, praktik di lapangan masih menunjukkan kesenjangan. Mulyadi (2017), Poernomo (2016), Wibowo & Muin (2016), Adioetomo, Mont, & Irwanto (2014) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi berisiko hanya mengarah pada pendidikan terintegrasi. Mattingly & McInerney menjelaskan bahwa integrasi terkadang diartikan hanya sebatas tindakan menggabungkan ABK di sekolah umum, namun ABK tidak belajar bersama dengan siswa lainnya. Sebaliknya, pendidikan inklusi adalah kondisi di mana ABK belajar secara efektif di sekolah umum dimana seluruh sistem di sekolah sudah disesuaikan untuk menjawab keragaman kebutuhan ABK.

4. TEMUAN STUDI

4.1 KEBERADAAN ABK DI LOMBOK TENGAH

Untuk mengetahui keberadaan ABK di Lombok Tengah, terdapat beberapa sumber data relevan yang dapat digunakan sebagai rujukan. Bagian ini menggambarkan proses dan hasil pengambilan data yang dilakukan oleh beberapa institusi tersebut terkait penyebaran ABK di Lombok Tengah. Hasil antar institusi mungkin berbeda karena pendekatan setiap institusi dalam melakukan pendataan ABK juga berbeda.

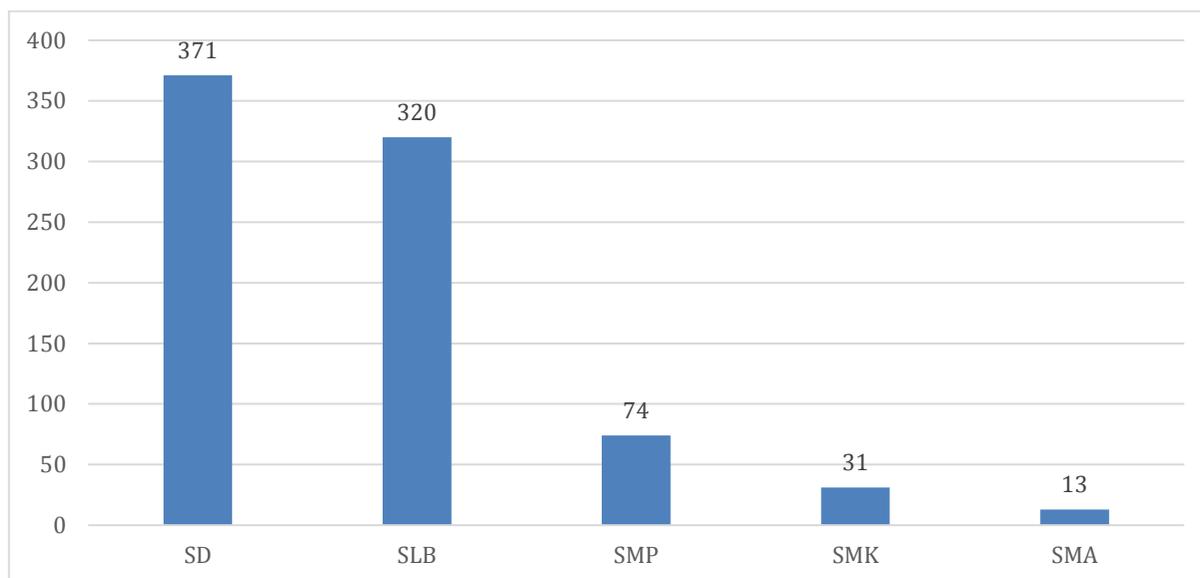
Data ABK Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan data utama yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat penyebaran ABK di Lombok Tengah. Identifikasi ABK pada Dapodik dilakukan oleh masing-masing sekolah. Biasanya, Dinas Pendidikan di kabupaten bersurat ke sekolah untuk meminta data mengenai jumlah ABK di sekolah-sekolah. Setelah itu, sekolah melalui operator Dapodik dan guru di sekolah tersebut melakukan pencatatan ABK secara manual sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan form yang disediakan oleh Kemendikbud.

Identifikasi ABK yang dilakukan untuk pendataan Dapodik, menggunakan klasifikasi kebutuhan khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) yang sudah diresmikan melalui Permendiknas No.73/2009. Terdapat 19 jenis kebutuhan khusus yaitu tuna netra, tuna rungu, down syndrome (ringan, sedang, dan berat), tuna daksa (ringan dan sedang), tuna laras, tuna wicara, tuna ganda, HIV AIDS, gifted, talented, kesulitan belajar (ADHD, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia), lambat belajar, autis, korban penyalahgunaan narkoba, dan indigo.

Berdasarkan Dapodik (2018), terdapat sebanyak 809 ABK yang tersebar dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah di Lombok Tengah (tabel 3). Dari tabel tersebut bisa diambil beberapa kesimpulan. Pertama, jumlah ABK semakin menurun seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa angka partisipasi ABK semakin menurun seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. Kedua, jumlah ABK di SLB masih relatif banyak. Meskipun angkanya lebih sedikit dari ABK yang ada di SD, perlu diingat bahwa jumlah SLB jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah SD sehingga secara proporsi ABK ada lebih banyak di SLB dibandingkan di SD. Hal ini bisa jadi disebabkan karena belum semua SD dapat menampung ABK.

Tabel 3 Jumlah ABK berdasarkan Jenjang Sekolah



Berdasarkan jenis kekhususannya, dari 809 anak, 30% ABK masuk kategori kesulitan belajar, 27% merupakan tuna grahita (baik ringan maupun sedang), 11% adalah tuna rungu, dan sekitar 6% baik untuk tuna daksa maupun tuna netra. Sisanya tersebar di jenis kebutuhan khusus lainnya dengan jumlah di bawah 5%.

Selama ini identifikasi ABK untuk Dapodik dilakukan oleh guru di masing-masing sekolah, meskipun sebenarnya identifikasi jenis kekhususan membutuhkan diagnosis profesional. Misalnya, untuk mengklasifikasikan anak sebagai tuna grahita, diperlukan asesmen psikologis dan tes intelegensi. Non-profesional tidak memiliki kewenangan untuk melakukan diagnosis. Hal ini sebenarnya sudah jelas tertulis di UU No.8/2016 dimana anak-anak terindikasi disabilitas harus dirujuk ke dokter, psikolog, atau psikiater. Fakta ini penting untuk menjadi catatan agar lebih hati-hati dalam menggunakan dan menginterpretasi data ABK di Dapodik.

Dalam proses wawancara dan diskusi, sebagian guru menyadari keterbatasan kemampuan dan kewenangan mereka dalam mengidentifikasi ABK. Kekhawatiran guru tersebut disampaikan juga oleh seorang pengawas:

“Kami nggak berani memvonis anak itu begini begini. Kalau nggak ada ahlinya. Itu yang kita angkat kemarin juga. Maka kami membutuhkan bantuan dokter atau psikolog. Karena guru hanya mendiagnosa berdasarkan identifikasi dari tools yang ada.” -Pengawas Sekolah

Beberapa tindakan sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi saat identifikasi. Pertama, memberikan tanggung jawab kepada guru yang sudah mengikuti KKT untuk melakukan identifikasi. Guru KKT adalah guru-guru yang diberikan kesempatan oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti kuliah non gelar terkait pendidikan inklusi. Mereka dianggap memiliki pengetahuan lebih tentang ABK. Mengingat jumlah guru KKT yang sangat terbatas, pemerintah juga sudah memberikan pelatihan kepada guru-guru kelas untuk dapat mengidentifikasi ABK. Terakhir, pemutakhiran data ABK secara periodik, setiap tiga bulan sekali dilakukan untuk memvalidasi data ABK di Dapodik.

Meskipun Dapodik masih memiliki kekurangan, data ini merupakan satu-satunya data yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kemendikbud terkait ABK. Sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) belum memiliki data ABK. Education Management Information System (EMIS), sejenis Dapodik, yang dikembangkan oleh Kemenag belum mengakomodasi data terkait ABK. Untuk mendapatkan perspektif lain

terkait keberadaan ABK di Lombok Tengah, bagian selanjutnya membahas data ABK yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

Data ABK Dinas Sosial

Selain Kemendikbud, pendataan ABK juga dilakukan oleh Dinas Sosial. Jika Dapodik fokus pada ABK yang berada di dalam sekolah, pendataan ABK oleh Dinas Sosial dilakukan kepada ABK yang menjadi penerima bantuan untuk Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kedisabilitas (PKSADK)³, baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Pendataan ini dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Basis yang digunakan untuk melakukan pendataan adalah kondisi ekonomi penerima bantuan, yang seluruhnya dianggap miskin sehingga ABK yang dianggap tidak miskin tidak ada di data ini.

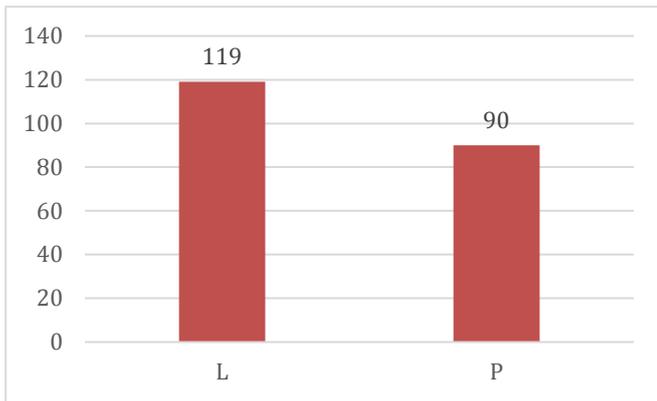
Penerima bantuan PKSADK biasa juga disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berikut ini adalah 26 kategori PMKS:

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban *Trafficking*
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

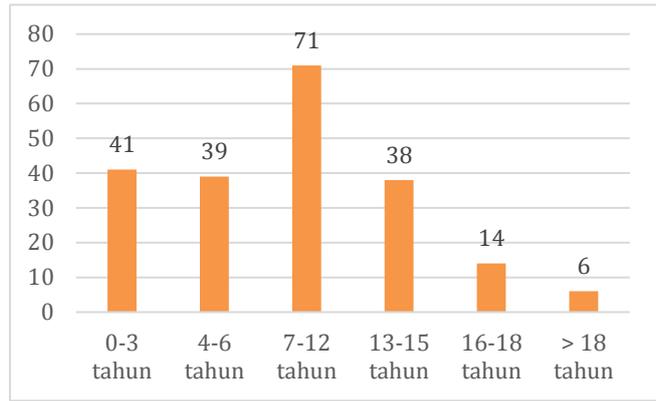
Studi ini juga merujuk pada data Dinas Sosial Lombok Tengah, yaitu penerima manfaat PKSDAK periode 2015-2018. Berdasarkan data tersebut, terdapat 298 PMKS yang teridentifikasi sebagai penyandang disabilitas. Namun, hanya 208 data yang memiliki informasi lengkap yang bisa dianalisis lebih jauh melalui studi ini.

Seperti yang dapat dilihat di tabel di bawah, dari 208 PMKS penyandang disabilitas, sekitar 57% laki-laki dan sekitar 43% adalah perempuan. Berdasarkan usia, kebanyakan penyandang disabilitas penerima program adalah anak-anak usia sekolah SD.

³ PKSADK adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, pengembangan potensi bakat dan kreativitas anak, dan penguatan tanggung jawab orang tua untuk anak dengan disabilitas.



Tabel 4 Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Gender

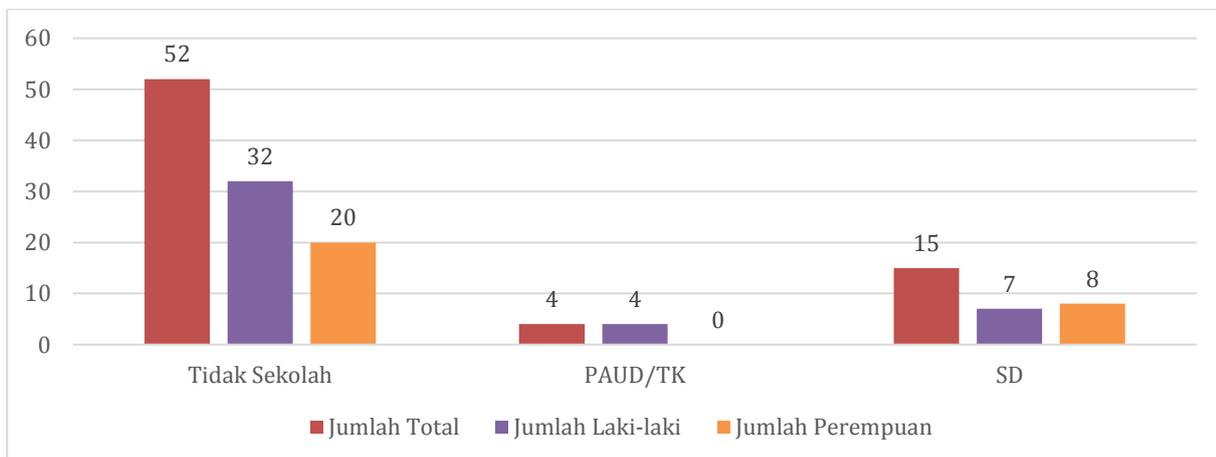


Tabel 5 Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Kategori Usia

Jika dibandingkan dengan jumlah ABK yang teridentifikasi di Dapodik, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua ABK yang ada di sekolah sudah menerima bantuan PKSDAK. Total ABK yang ada di Dapodik sebanyak 809, sementara total anak usia sekolah penerima bantuan hanya 123. Angka tersebut sudah merupakan gabungan antara anak-anak usia sekolah yang ada di sekolah dan luar sekolah.

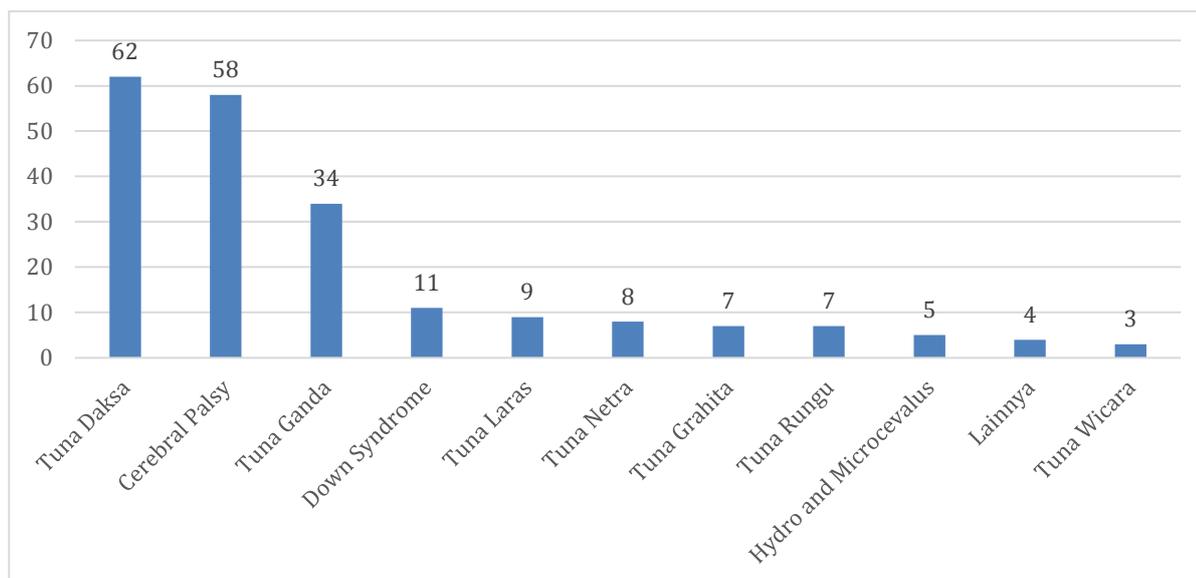
Dari 71 penyandang disabilitas yang merupakan anak-anak usia sekolah, 73%-nya tidak bersekolah. Sisanya, yaitu sebesar 6% dan 21% ada di PAUD/TK dan SD-sederajat. Hal ini mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas memang sangat rentan untuk tidak bersekolah. Dibandingkan perempuan, proporsi anak laki-laki usia SD yang ada di luar sekolah lebih besar yaitu 71% berbanding 74%. Hal ini mungkin juga terjadi karena ada lebih banyak ABK laki-laki dibandingkan perempuan. Studi lanjutan dapat dilakukan untuk melihat proporsi keberadaan ABK berdasarkan gender.

Tabel 6 Jumlah Penyandang Disabilitas Usia SD berdasarkan Partisipasi Sekolah



Berdasarkan kekhususannya, paling banyak adalah penyandang tuna daksa dan *cerebral palsy*. Berikutnya adalah penyandang tuna ganda, yaitu orang-orang yang memiliki ketunaan lebih dari satu. Berikut ini adalah gambaran penyebaran disabilitas berdasarkan kekhususannya:

Tabel 7 Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Kekhususan



Meskipun pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dapodik menggunakan pendekatan dan definisi ABK yang agak berbeda, dua analisis ini menggambarkan bahwa memang ada cukup banyak ABK ditemukan di kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena identifikasi di kedua data tidak dilakukan oleh profesional, maka kekhususan yang lebih banyak ditemukan adalah kekhususan yang bersifat fisik dan relatif lebih mudah diamati. Jika melibatkan profesional, bisa jadi akan lebih banyak kekhususan yang erat kaitannya dengan proses mental anak, yang lebih sulit diamati. Dengan kata lain, ada kemungkinan lebih banyak ABK dapat teridentifikasi.

Sayangnya, meskipun data ini cukup kaya dan proses pendataannya dilakukan di lingkungan masyarakat, berdasarkan studi lanjutan dapat disimpulkan bahwa tidak banyak narasumber yang mengetahui keberadaan dan manfaat data ini. Mayoritas perangkat desa yang terlibat dalam studi ini juga mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya data ABK di desa mereka. Salah satu penyebabnya adalah karena selama ini perangkat desa lebih banyak berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan tidak banyak melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial.

Data ABK Tingkat Desa

Berbeda dengan pendataan ABK yang dilakukan di Dapodik dan oleh Dinas Sosial, pendataan di desa tidak dilakukan secara rutin. Di beberapa desa bahkan tidak dilakukan pendataan ABK sama sekali. Padahal di pasal 119 UU No.8/2016 sudah dijelaskan bahwa lurah dan kepala desa berkewajiban untuk melakukan pendataan ABK yang ada di lingkungan sekitar. Wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa pendataan ABK hanya dilakukan ketika desa ingin menerima bantuan. Misalnya di Desa Teratak, seorang informan menjelaskan bahwa data ABK dapat ditemukan di profil desa meskipun jumlahnya sangat terbatas. Data ini dipakai untuk berkoordinasi dengan Puskesmas di tingkat desa. Selain belum adanya sistem pendataan yang jelas, data ABK di level desa sulit ditemukan karena isu disabilitas masih belum populer dibandingkan isu stunting. Seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa stunting sedang menjadi isu penting didesanya.

“Desa kita lagi gencar-gencarnya stunting. Data ABK sedikit, tetapi stunting ada banyak.” -Tokoh Masyarakat

Rendahnya fokus pada isu disabilitas di level desa juga dapat diobservasi dari sangat minimnya program, regulasi, dan anggaran yang berfokus pada perbaikan kehidupan ABK. Menurut narasumber tidak

banyaknya ABK di satu desa menyebabkan isu ini kurang menjadi prioritas pemerintah desa. Sayangnya, penentuan banyak atau tidaknya ABK tersebut masih dilakukan berdasarkan observasi tidak terstruktur, bukan melalui pendataan sistematis.

4.2 PEMAHAMAN DAN SIKAP TERHADAP ABK

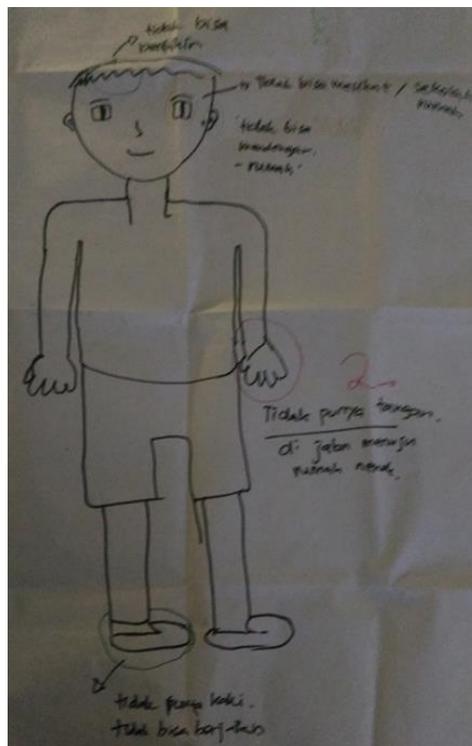
Bagian sebelumnya sudah membahas penyebaran ABK berdasarkan data sekunder, terutama dari Dapodik dan dari data Dinas Sosial. Bagian ini berusaha untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat Lombok Tengah, termasuk tentang bagaimana mereka mengidentifikasi ABK dan sikap serta harapan mereka terkait keberadaan ABK.

Pengamatan pada Keberadaan ABK

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi, narasumber menjelaskan bahwa saat ini ABK bisa lebih mudah ditemui, baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Di sekolah-sekolah yang dikunjungi oleh studi ini, ditemukan beberapa ABK dengan kekhususan yang cukup beragam. Meskipun masih ada orang tua yang membatasi kehidupan anaknya yang ABK, misalnya dengan tidak mengirimkannya ke sekolah dan melarangnya keluar rumah, fenomena seperti ini mulai menurun belakangan ini.

Diskusi dengan anak-anak menunjukkan bahwa sebagian dari mereka sudah cukup familiar dengan kekhususan yang sifatnya fisik. Gambar di bawah menggambarkan apa yang anak maksud dengan ABK. Dari gambar itu, terdapat beberapa kekhususan yang berhasil disebutkan anak yaitu tidak memiliki bagian tubuh lengkap (misalnya tangan dan kaki), tidak mampu berjalan, melihat dan mendengar, serta tidak mampu berpikir.

Gambar 1 Ilustrasi Anak tentang ABK



Seorang anak lainnya juga mampu menjelaskan apa yang dia maksud dengan ABK dengan mengatakan bahwa ada fungsi dalam diri anak yang tidak dapat berfungsi seperti anak lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman anak-anak tentang ABK ini tidak lepas dari adanya interaksi mereka dengan ABK, baik yang ada di lingkungan sekolahnya, maupun lingkungan di mana dia tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa

interaksi antara siswa non-ABK dan ABK bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa non-ABK tentang kekhususan anak-anak lainnya.

“Anak yang berbeda dengan kita, ada organ yang bekerja tidak sempurna seperti kita, tidak normal, tuna netra, tidak bisa berjalan, sakit mental.” -Siswa non-ABK

Pemahaman masyarakat dan orang tua tidak jauh berbeda dengan pemahaman anak tentang ABK. Saat ditanya tentang apa yang mereka pahami tentang ABK, jawaban mereka tidak jauh dari kekhususan yang sifatnya fisik. Sebagian narasumber ada juga yang menyebutkan gangguan mental. Sayangnya karena keterbatasan pengetahuan, banyak dari mereka yang lebih memilih untuk menggunakan kata idiot untuk menggambarkan apa yang mereka maksud dengan gangguan mental.

“Di desa ini, anak-anak berkebutuhan khusus ini yang istilahnya idiot itu lah kasarnya.” -Tokoh Masyarakat

Warga sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, dan pengawas, memiliki pemahaman yang lebih luas tentang ABK. Definisi mereka tentang ABK tidak hanya sebatas kekhususan yang sifatnya fisik. Guru juga menganggap anak-anak yang memiliki kesulitan belajar sebagai ABK. Hal ini tidak mengejutkan mengingat salah satu klasifikasi kekhususan di Dapodik adalah kesulitan belajar. Dapodik juga menunjukkan bahwa cukup banyak anak-anak dengan kesulitan belajar yang teridentifikasi di Lombok Tengah.

“Ya menurut saya ABK itu kan bukan hanya cacat fisik aja, tapi kalau di kelas anak yang lamban belajar atau kesulitan belajar itu juga ABK yang memerlukan penanganan khusus sesuai kebutuhan.” -Guru

Pemahaman yang lebih luas tentang ABK juga terindikasi dari jawaban guru yang mengatakan bahwa ABK tidak selalu identik dengan kerentanan. Menurut guru, anak-anak dengan kecerdasan super dan di atas rata-rata juga memerlukan perlakuan khusus. Misalnya adalah dengan memberikan tambahan tugas untuk menyalurkan energi mereka. Sama halnya dengan kesulitan belajar, pemahaman warga sekolah tentang kekhususan ini, mungkin juga tidak lepas dari adanya klasifikasi ‘anak berbakat’ di dalam instrumen ABK Dapodik.

Bagian ini menunjukkan bahwa ABK memang benar ada di Lombok Tengah, dengan kekhususan yang cukup beragam, seperti yang ditampilkan melalui Dapodik dan data Dinas Sosial. Baik anak-anak maupun masyarakat, termasuk orang tua, cenderung memiliki pemahaman yang lebih sempit dibandingkan warga sekolah dalam memahami ABK. Mereka lebih mudah untuk mengidentifikasi kekhususan yang sifatnya fisik dan lebih mudah diobservasi. Sementara, warga sekolah sudah mulai dapat mengidentifikasi kekhususan yang sifatnya lebih terkait proses mental. Selain itu, warga sekolah juga sudah memahami bahwa ABK tidak melulu identik dengan kerentanan.

Meskipun demikian, dibutuhkan kehati-hatian untuk menginterpretasi pemahaman warga sekolah tentang anak dengan kesulitan belajar dan anak berbakat. Kedua jenis kekhususan ini membutuhkan profesional untuk melakukan diagnosis. Tanpa pendampingan profesional, interpretasi mereka terhadap ABK dengan kategori itu berpotensi untuk merugikan ABK. Misalnya, anak-anak yang tidak dapat membaca, bisa jadi bukan karena mereka memiliki hambatan fungsional untuk belajar, namun menghadapi kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti misalnya gaya atau teknik mengajar guru yang kurang tepat atau kurang menarik.

Baik data sekunder, Dapodik dan data Dinas Sosial serta hasil pengambilan data melalui wawancara dan diskusi menunjukkan bahwa pendekatan medis dalam memahami keberadaan ABK masih sangat dominan di Lombok Tengah. Kekhususan yang terjadi pada ABK dianggap bukan merupakan akibat yang terjadi karena faktor-faktor sosial yang kurang suportif seperti yang ditawarkan oleh pendekatan *social model*. ABK dianggap sekadar anak-anak yang mengalami *impairments* dan *activity limitations*; sedangkan mereka yang mengalami *participation restrictions* tidak dianggap ABK.

Sikap terhadap ABK

“Kalau yang saya lihat memang, masyarakat tidak tahu apa penyebabnya dan masyarakat tidak terlalu membicarakannya karena ini sudah takdir Tuhan.” -Tokoh Masyarakat

Kutipan di atas adalah jawaban yang umum muncul ketika narasumber ditanya terkait dengan sikap mereka terhadap keberadaan ABK di daerah mereka. Menggunakan tiga pendekatan yang diajukan oleh Purwanta (2018), mayoritas informan cenderung menggunakan pendekatan magis dalam memahami ABK. Selain takdir, ada juga yang menggunakan istilah ‘cobaan’ dari Yang Maha Kuasa. Pendekatan magis dalam memahami ABK ini tidak terlepas dari konteks masyarakat Lombok, termasuk Lombok Tengah, yang mayoritas warganya adalah suku Sasak. Suku Sasak dikenal sebagai penganut agama yang taat mempraktikkan ajaran agamanya.

Memahami bahwa ABK merupakan takdir Tuhan membuat orang tua, masyarakat, warga sekolah, termasuk murid lebih bisa menerima keberadaan ABK. Penerimaan terhadap ABK dapat dianggap sebagai penerimaan terhadap takdir Tuhan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Purwanta (2018) bahwa orang-orang dengan pendekatan magis akan cenderung menjalankan takdir-Nya saja. Di beberapa lokasi penelitian, adanya pemahaman bahwa ABK merupakan takdir Tuhan mendorong orang-orang untuk memberikan bantuan kepada ABK. Mereka beranggapan bahwa menolong orang yang ditakdirkan kurang beruntung merupakan hal baik yang perlu dilakukan.

Selain pandangan magis, ada juga yang memandang keberadaan ABK dengan menggunakan pendekatan kesadaran naif (Purwanta, 2018). Pendekatan ini menjelaskan ABK sebagai anak-anak dengan masalah medis. Misalnya ada yang menganggap bahwa ABK merupakan anak-anak yang terlahir kurang dari 9 bulan. Narasumber lainnya menjelaskan bahwa ABK terjadi karena proses aborsi yang gagal dilakukan oleh orang tuanya.

Berbeda dengan pendekatan magis yang cenderung lebih ‘menerima’, pendekatan ini mendorong orang tua untuk bertindak aktif mencari pengobatan medis karena menganggap bahwa kekhususan pada anak dapat disembuhkan. Alternatif lain untuk bisa menyembuhkan ABK adalah dengan mengirimnya ke sekolah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu orang tua dari ABK yang mengatakan bahwa alasannya mengirimkan anaknya ke TK adalah agar anaknya menjadi normal seperti kebanyakan anak lainnya.

Di dalam studi, tidak ada klasifikasi jelas terkait mana yang menggunakan pendekatan religius dan medis. Mayoritas yang terlibat di dalam studi lanjutan terindikasi menggunakan kedua perspektif itu, meskipun pendekatan religius lebih dominan muncul melalui proses wawancara dan diskusi. Hal ini menggambarkan bahwa walaupun di satu sisi mereka menerima kondisi ABK, di sisi lain mereka tetap berkeyakinan atau setidaknya berharap bahwa kekhususan pada ABK dapat disembuhkan. Dari seluruh narasumber yang terlibat di wawancara dan diskusi, tidak ada satu pun yang menjelaskan bahwa ABK merupakan akibat dari proses pembatasan yang terjadi secara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kritis dalam memahami ABK belum terjadi di Lombok Tengah.

Dalam proses pengambilan data, juga masih ditemukan beberapa pandangan negatif yang berpotensi untuk memperburuk kehidupan ABK. Misalnya, masih ada orang tua yang memandang bahwa ABK dapat menularkan ‘penyakit’ ke anak-anak lainnya. Hal ini membuat orang tua bersikap negatif terhadap pendidikan inklusi, yang menggabungkan ABK dengan anak lainnya di kelas yang sama. Pandangan negatif lainnya datang juga dari guru. Sebagian beranggapan bahwa ABK berpotensi mengganggu proses pembelajaran di kelas.

Masih adanya sikap negatif terhadap keberadaan ABK tidak lepas dari masih minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aktor-aktor terkait ABK dan keterampilan untuk menangani hal-hal berkaitan dengan ABK. Misalnya dalam cerita guru di atas, belum adanya kemampuan guru untuk mengatasi kelas inklusi membuatnya kesulitan untuk melakukan manajemen kelas. Alih-alih mengatakan bahwa dirinya kurang

memiliki kemampuan, guru cenderung memandang bahwa problemnya ada di ABK yang lebih sulit diatur. Studi yang dilakukan oleh Adioetomo, Mont, & Irwanto (2014) menawarkan penyebab lain terkait sikap negatif sekolah terhadap ABK yaitu ketakutan mereka bahwa performa sekolah, yang biasanya diukur dari nilai ujian, akan menurun jika ada ABK di sekolah mereka.

Analisis ini menunjukkan bahwa penting bagi pemerintah untuk segera meningkatkan kapasitas dan pemahaman aktor-aktor yang berkaitan dengan ABK agar sikap mereka dapat menjadi lebih positif. Urgensi agar pemerintah segera membuat program untuk mengatasi hal itu muncul juga dari salah seorang tokoh masyarakat.

“Masih ada yang memandang ABK sebagai beban. Itu kan kasihan. Makanya sangat penting sekali penyadaran kepada masyarakat bahwa ABK memiliki hak yang sama.” -Tokoh Masyarakat

Haraoab terhadap ABK

Meskipun seluruh narasumber menyadari bahwa ABK memiliki keterbatasan dan perbedaan dengan anak-anak lain, aktor-aktor, terutama orang tua, masyarakat, dan guru masih memiliki harapan besar terhadap kehidupan ABK. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, banyak orang tua berharap anaknya yang ABK bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Di sekolah, orang tua berharap bahwa anaknya bisa berinteraksi dengan lebih banyak anak-anak lainnya. Selain itu, baik orang tua maupun guru juga menyatakan harapannya agar anak-anak bisa berpartisipasi di kegiatan-kegiatan non-akademis di sekolah. Selama ini ada anggapan bahwa jika ABK tidak terlalu unggul di akademis, mungkin mereka unggul di kegiatan non-akademis.

“Ada istilah orang Sasak, jika tidak bisa bersuara dia bisa menulis, kalau tidak bisa menulis, dia bisa membedakan mana yang miliknya atau pun bukan. Selama ini tidak pernah ada yang menolak ABK untuk masuk ke sekolah ini.” -Kepala Sekolah

Harapan pada ABK, tidak saja berhenti di kehidupannya sekarang. Orang tua dari ABK mengungkapkan harapannya terkait kehidupan anaknya di masa mendatang. Orang tua berharap bahwa anaknya bisa menamatkan pendidikan dan mencari nafkah.

“Mudah-mudahan bisa sekolah sampai SMK. Supaya bisa mencari uang. Dia (anak) niat sama teman-temannya setelah tamat SMK ingin ke Australia.” -Orang tua ABK

Selain berharap, sebagian orang tua dari ABK juga menyadari bahwa dirinya harus terus belajar untuk menambah pengetahuan dan membantu mereka memenuhi harapan-harapannya pada ABK. Mereka menyadari minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh ABK. Hal ini yang menyebabkan mereka juga sangat berharap kepada guru untuk mengompensasi ketidakmampuan mereka dalam memberikan intervensi yang tepat kepada anak mereka.

4.3 AKSES ABK PADA HAK ANAK

Tidak ada narasumber dalam studi ini yang mengetahui lebih detil tentang hak-hak ABK berdasarkan hasil CRPD maupun hak penyandang disabilitas yang ada di UU No.8/2016. Namun, mereka dapat menyebutkan beberapa hak anak yang penting untuk dipenuhi. Hak anak tersebut tidak berbeda antara hak ABK dan anak lainnya, yaitu hak untuk bermain dan berinteraksi, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pengobatan, dan hak untuk belajar. Bagian ini membahas tentang pemenuhan hak tersebut. Pemenuhan hak belajar dibahas di bagian terpisah.

Pemenuhan Hak Bermain dan Berinteraksi ABK

Hak ini menggambarkan kesempatan anak untuk bermain dan bersosialisasi dengan rekan sebayanya. Studi lanjutan menunjukkan hal yang beragam terkait pemenuhan hak ABK ini baik dari rekan sesamanya maupun kesempatan yang diberikan oleh aktor-aktor signifikan kepada ABK untuk berinteraksi dengan rekannya. Meskipun secara umum lingkungan ABK sudah memberikan kesempatan kepada ABK untuk bermain dan berinteraksi, di beberapa tempat, perundungan kepada ABK masih sangat jelas terlihat.

Di beberapa sekolah yang menjadi objek penelitian, ABK sangat diterima dan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Salah seorang ABK yang merupakan penyandang disabilitas tuna daksa mengatakan bahwa dirinya merasa senang di sekolah karena teman-teman sangat menerima dan mengerti keterbatasannya.

“Aku merasa sangat diterima oleh teman-teman sehingga aku merasa senang berada di sekolah. Teman-teman sekolah juga baik, mereka mengerti dengan kondisi aku yang berbeda dengan mereka. Guru di sekolah juga mendidik teman-teman agar membantu antar sesama, misalnya kalau aku mau masuk kelas, dibantu dorong atau diangkat, pas jajan juga.” -Siswa ABK

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peranan penting untuk membentuk norma yang ada di sekolah. Anjuran untuk membantu sesama mungkin berkontribusi pada terbentuknya lingkungan suportif di sekolah. Griffith, Cooper, & Ringlaben (2002) menjelaskan bahwa mempersiapkan siswa non-ABK merupakan salah satu tindakan yang harus diambil dalam implementasi pendidikan inklusi. Persiapan ini dapat berupa memberikan pemahaman kepada siswa di kelas tentang perbedaan dan persamaan, membantu siswa untuk mengembangkan rasa kepeduliannya, dan mengembangkan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi positif dengan siswa lainnya. Selain kontribusi guru, lingkungan suportif terhadap ABK juga dapat terwujud dari sikap positif siswa non-ABK terhadap ABK.

“Mereka bisa main dengan siapa saja. Berteman dengan perempuan ataupun laki-laki.” -Siswa non-ABK

“Anak berkebutuhan khusus ini boleh bermain bersama dengan teman yang lain.” -Siswa non-ABK

Seorang penyandang disabilitas lainnya mengatakan bahwa dirinya tidak saja bermain dengan temannya di sekolah, melainkan juga di luar sekolah, seperti misalnya bermain bola.

“Aku memiliki teman bermain di sekolah. Sahabatku di sekolah bernama Karim, Adin, dan Rabi. Aku biasa bermain bola di sekolah dan di rumah.” -ABK

Selain bermain, interaksi antara ABK dengan anak lainnya juga dapat diamati melalui interaksi mereka di kelas. Salah satu interaksi yang menarik untuk diamati adalah adanya anak-anak lain yang membantu ABK dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan terbatasnya guru khusus yang disediakan sekolah untuk membantu ABK.

“Dia tidak jelas untuk melihat. Jadi dia harus sangat dekat dengan papan tulis untuk bisa membaca sehingga diberikan kursi di depan oleh guru. Dia punya teman di kelas yang membantu pada saat pelajaran berhitung.” -Siswa non-ABK

Sayangnya, tidak semua ABK mendapatkan lingkungan yang suportif. Di beberapa tempat, ditemui juga perundungan yang terjadi pada ABK. Perundungan yang paling banyak terjadi adalah perundungan yang bersifat verbal, misalnya dengan mengejek bodoh atau label-label lain yang identik dengan ketunaan ABK. Ada juga perundungan dalam bentuk diskriminasi dimana anak-anak lain di kelas tidak mau bermain dengan ABK karena keterbatasannya.

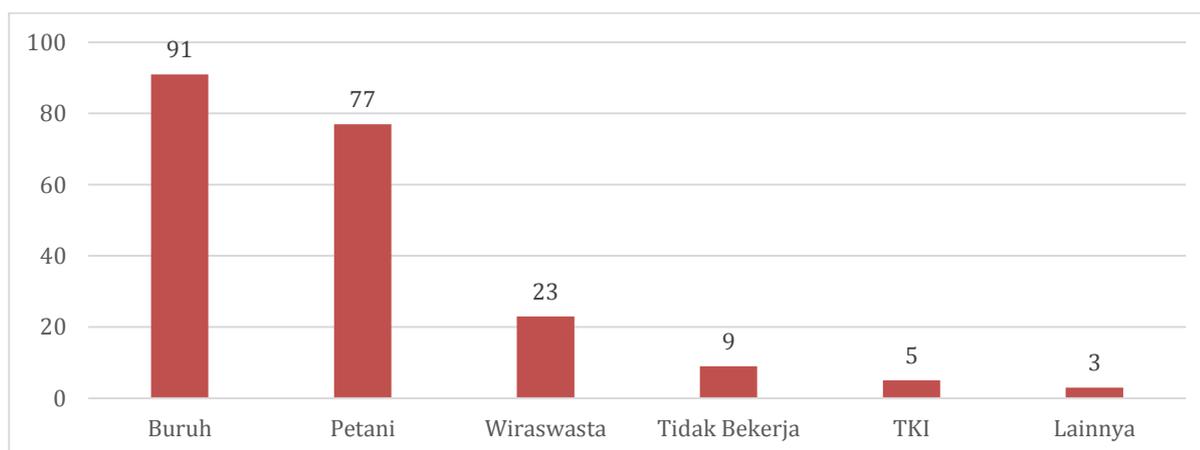
Perundungan yang dilakukan terhadap ABK di lingkungan sekolah berdampak negatif baik pada sikap maupun perilaku ABK. Misalnya di suatu sekolah, guru mengatakan bahwa ABK menjadi kurang percaya diri karena kerap kali mendapat ejekan dari temannya. Sikap dan perilaku negatif siswa non-ABK juga mempengaruhi kondisi emosi ABK, yang menjadi lebih cepat marah dan menangis. Terkadang hal-hal ini membuat ABK menjadi malas datang ke sekolah dan keluar rumah. Orang tua ABK bahkan ada yang kemudian membatasi kehidupan ABK, dengan melarangnya keluar rumah, agar ABK tidak mendapatkan perlakuan negatif dari lingkungan, termasuk teman-temannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu perundungan pada ABK harus segera diatasi untuk mencegah bertambah rentannya kehidupan ABK.

Pemenuhan Hak Mendapatkan Kasih Sayang ABK

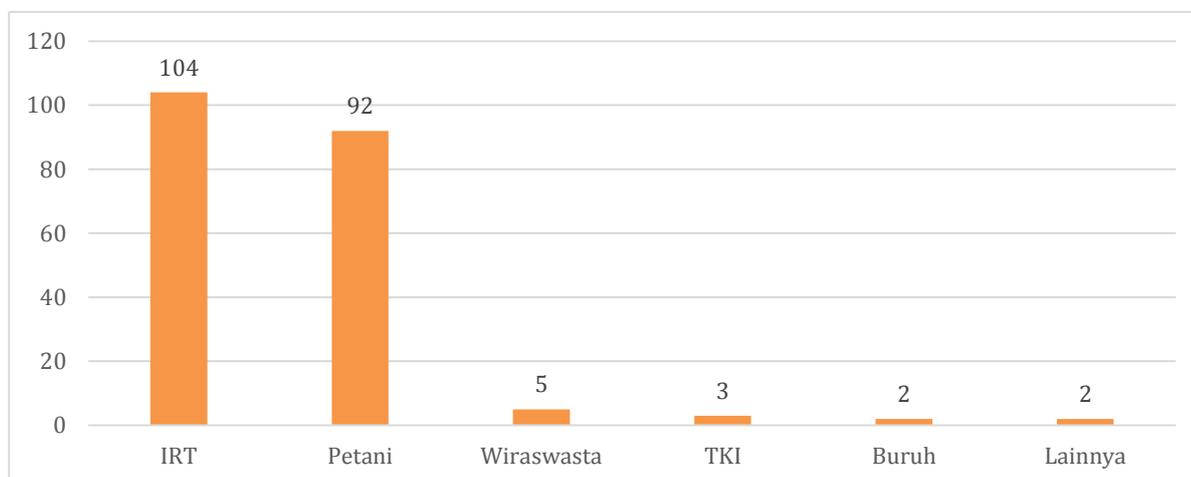
Wibowo & Muin (2016) dan Cameron & Suarez (2017) menjelaskan bahwa isu kemiskinan sangat erat dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sangat rentan menjadi miskin, sebaliknya orang-orang dengan ekonomi terbatas juga rentan menjadi penyandang disabilitas. Hal ini terkonfirmasi melalui studi lapangan yang dilakukan di Lombok Tengah. Mayoritas ABK berasal dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung. Banyak dari mereka merupakan anak-anak dari orang tua yang miskin dan berpendidikan rendah. Sebagian dari mereka lahir dari orang tua yang juga merupakan penyandang disabilitas.

Selain hasil wawancara, analisis dengan menggunakan data Dinas Sosial juga menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan orang tua dari ABK adalah petani dan buruh untuk bapak dan ibu rumah tangga dan petani untuk ibu, seperti dapat dilihat di tabel di bawah:

Tabel 8 Pekerjaan Bapak dari ABK



Tabel 9 Pekerjaan Ibu dari ABK



Beberapa ABK ditemukan juga tidak tinggal bersama orang tua kandungnya, melainkan diasuh oleh kakek-neneknya atau orang tua tiri. Ada tiga penyebab utama yang muncul selama pengambilan data. Pertama, perceraian orang tua dari ABK yang menyebabkannya harus tinggal hanya dengan salah satu orang tua atau bahkan hanya dengan kakek-neneknya. Selanjutnya adalah orang tua yang harus bekerja menjadi TKI. Oleh karena ekonomi keluarga ABK yang sangat terbatas, tidak sedikit orang tua mereka yang memutuskan untuk merantau ke luar Lombok demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terakhir, ada beberapa orang tua dari ABK yang sudah meninggal dunia.

Kondisi di atas membuat kehidupan ABK menjadi sangat rentan. Selain berpotensi untuk kurang mendapatkan perhatian, mereka juga rentan untuk mendapatkan penanganan yang kurang tepat. Beberapa guru di dalam studi ini juga mengeluhkan beberapa orang tua ABK yang kurang memperhatikan anaknya. Salah satu keluhan datang dari guru di sekolah negeri, yang memiliki siswa ABK dikelasnya.

“Kami selama ini, faktor dari orang tuanya terkait ABK, saya rasa masih kurang memadai, tidak ada perhatian sama sekali.” -Guru

Kondisi kurang beruntung ini juga membawa dampak buruk pada anggota keluarga lainnya. Misalnya adalah saudara dari ABK yang kerap kali diminta untuk menjaga ABK, baik di luar waktu sekolah maupun waktu sekolah. Seperti yang terjadi pada salah satu ABK yang bersekolah di salah satu madrasah.

“Di rumah tinggal dengan kakak, belajar sama kakak. Bapak bekerja, kadang pulang kadang tidak. Ibu bekerja di Malaysia.” -ABK

Kurangnya perhatian orang tua, tidak terjadi pada semua ABK di Lombok Tengah. Orang tua yang kondisi sosial ekonominya lebih baik, terlihat mengalokasikan waktunya untuk merawat ABK. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada ABK berprestasi yang ditemukan di dalam studi ini. ABK yang memiliki kekhususan tuna daksa tersebut, selalu berhasil meraih peringkat dikelasnya. Faktor yang mungkin berkontribusi adalah perhatian dan waktu yang diberikan orang tuanya, terutama ibu, untuk merawat dan menjaganya.

“Bagi saya tidak terlalu sulit merawat ABK karena sudah menjadi rutinitas mulai dari memandikan, memberikan makan, mengantar, menunggu hingga pulang sekolah. Setiap hari kita bersihkan dia, di apa, segala macam itu. Saya angkat, semasa saya kuat angkat, ya saya angkat. Jika sudah tidak kuat, ya apa boleh buat, dia jalan sendiri.” – Ibu dari ABK

Selain mengalokasikan waktunya untuk memberikan perhatian di rumah, bentuk lain perhatian orang tua ke ABK adalah dengan menemani anaknya untuk belajar di sekolah. Bahkan ada yang ikut duduk di dalam kelas, selama pelajaran berlangsung. Biasanya ini terjadi pada ABK yang baru saja memulai sekolah di kelas rendah. Sama dengan cerita sebelumnya, orang tua yang menjadi aktor utama di sini adalah ibu.

Dua cerita ini menunjukkan bahwa orang tua, dalam hal ini ibu, memiliki peranan yang sangat penting pada kehidupan ABK. Meskipun ada orang tua yang dianggap berhasil memenuhi hak anak terkait kasih sayang dan perhatian, di banyak kehidupan ABK lainnya, mereka gagal mendapatkan ini, terutama di keluarga. Masalah kemiskinan, kurangnya pengetahuan, dan kondisi-kondisi tidak beruntung lainnya, seperti perceraian dan meninggal, berkontribusi pada kegagalan ABK mendapatkan hak ini. Oleh karena itu, perhatian dan didikan guru di sekolah menjadi sangat penting untuk mengompensasi hak-hak yang ABK tidak dapatkan di rumah.

Pemenuhan Hak Pengobatan ABK

Ini adalah salah satu hak yang umum disebutkan dalam studi lanjutan. Hak ini menggambarkan bahwa setiap ABK perlu mendapatkan bantuan, baik itu medis maupun lainnya, untuk bisa menjalani kehidupan yang dianggap sehat, baik secara fisik maupun psikologis. Sayangnya, hasil dari diskusi dan wawancara

menyimpulkan bahwa pemenuhan hak pengobatan untuk ABK kerap kali menghadapi tantangan-tantangan besar.

Seperti kabupaten-kabupaten lainnya, di Lombok Tengah, akses terhadap fasilitas kesehatan baik puskesmas, klinik maupun rumah sakit memadai untuk ABK sangat terbatas. Tempat yang dianggap paling relevan untuk dituju oleh orang tua ABK hanya ada di Mataram. Oleh karena keterbatasan biaya, alat transportasi, dan waktu, orang tua ABK pun akhirnya enggan untuk membawa anaknya ke Mataram. Beberapa orang tua, tidak seluruhnya, sebenarnya mengatakan bahwa anaknya memiliki BPJS yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan rumah sakit secara gratis. Sayangnya BPJS tidak menanggung biaya yang dibutuhkan anak dan keluarganya untuk mobilisasi dari desa ke ibu kota provinsi.

Selain minim fasilitas dan mahal biaya (termasuk biaya mobilisasi), Lombok Tengah juga dianggap belum memiliki tenaga profesional yang memadai untuk menangani ABK. Ada orang tua yang mengeluhkan bahwa anaknya pernah salah mendapatkan diagnosa dokter. Kondisi ini berakibat pada kesalahan penanganan yang perlu dilakukan sejak dini kepada ABK.

“Saya pernah ke dokter, katanya syaraf motoriknya lambat berkembang. Disuruh mandikan pakai air hangat bertahun-tahun tetapi tidak ada perkembangan.” -Orang tua ABK

Selain mengakses pengobatan medis, beberapa orang tua ada juga yang memilih pengobatan alternatif dan tradisional. Biasanya pengobatan model ini identik dengan pendekatan keagamaan, melalui doa bersama atau konsultasi dengan pemuka agama. Preferensi orang tua terhadap pengobatan jenis ini, tidak terlepas dari pemahaman mereka bahwa kondisi ABK yang terjadi pada anak mereka adalah karena kuasa Tuhan. Meskipun pendekatan ini berpotensi untuk meningkatkan penerimaan orang tua pada kondisi yang terjadi pada anak mereka, membawa ABK ke pengobatan tradisional yang fokus dengan pendekatan agama, kurang membantu untuk mengatasi problem-problem medis yang terjadi pada ABK.

4.4 PENDIDIKAN INKLUSI DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PADA ABK

Bagian ini menjelaskan bagaimana pendidikan inklusi dilaksanakan di kabupaten Lombok Tengah, khususnya bagaimana ABK memiliki hak terhadap pendidikan inklusi. Sebelum membahas detail tentang pelaksanaannya, dijabarkan kebijakan dan peraturan yang menjadi payung dari kegiatan-kegiatan terkait pendidikan inklusi. Studi ini juga mengeksplorasi pemahaman aktor-aktor relevan tentang beberapa aturan terkait dengan pendidikan inklusi. Untuk menyimpulkan bagian ini, di bagian akhir dijelaskan faktor pendukung dan penghambat untuk mewujudkan pendidikan inklusi bagi anak-anak di Lombok Tengah.

Kebijakan dan Program Pendidikan Inklusi di Lombok Tengah

Pada tanggal 24 September 2012, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Inklusi. Salah satu komitmen yang muncul dari deklarasi tersebut adalah melaksanakan pendidikan inklusi di Lombok Tengah. Untuk mempermudah proses pelaksanaan pendidikan inklusi, pemerintah Lombok Tengah membuat dua kebijakan utama setelah deklarasi yaitu Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dan SK Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Kebijakan lokal ini dibuat dengan mengacu pada dua aturan yang lebih tinggi yaitu Permendiknas No. 70/2009 tentang Pendidikan Inklusi dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 2/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Deklarasi Lombok Tengah sebagai Kabupaten Inklusi dan penerbitan payung hukum dalam bentuk Perbup dan SK diambil untuk merespon angka partisipasi tingkat sekolah dasar di Lombok Tengah yang belum 100%. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap capaian itu adalah masih adanya anak-anak

berkebutuhan khusus yang ada di luar sekolah. Saat itu, orang tua dianggap masih malu untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah. Di samping, sekolah yang mungkin saat itu memang belum siap untuk menerima ABK.

Melalui penerbitan Perbup No. 39/2013, dinas-dinas terkait diharapkan mampu berpartisipasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk ABK. Salah satu dinas yang diharapkan untuk memiliki banyak kontribusi adalah Dinas Pendidikan. Meskipun cenderung agak lambat, tiga tahun setelah adanya Perbup tentang pendidikan inklusi, Dinas Pendidikan mengeluarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah No. 22/2016 tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi untuk menunjuk sekolah-sekolah inklusi. Aturan ini menunjuk beberapa sekolah yang wajib melaksanakan pendidikan inklusi. Berbeda dengan periode sebelumnya dimana ABK hanya bisa bersekolah di sekolah luar biasa, aturan ini membuka akses lebih besar kepada ABK untuk memperoleh pendidikan. Selain adanya aturan-aturan tersebut, terdapat beberapa hal lainnya yang juga dilakukan untuk mewujudkan Lombok Tengah sebagai kabupaten yang lebih inklusi, yaitu:

Tabel 10 Kebijakan dan Program untuk Mendukung Pendidikan Inklusif di Lombok Tengah

Kebijakan atau Program	Deskripsi
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi	Pokja Inklusi terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan sebagai ketua Pokja dengan anggota Sekretaris Dinas Pendidikan, pemangku kepentingan terkait dari Bappeda, Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, dan pejabat Dinas Pendidikan di level kecamatan. Tugas utama dari Pokja Inklusi adalah melakukan sosialisasi pendidikan inklusi, melayani dan membina sekolah-sekolah yang menyelenggarakan inklusi, termasuk sekolah baru, dan memfasilitasi sekolah lain untuk menjadi sekolah inklusi. Sejak tahun 2012, Pokja Inklusi melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan didanai oleh APBD.
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Satuan Pendidikan	Hingga saat ini, kabupaten Lombok Tengah mempunyai 120 sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi dari 598 sekolah dasar dan 19 untuk sekolah menengah pertama penyelenggara pendidikan inklusi dari 169 sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan sekolah inklusi ini didasarkan pada data yang menunjukkan ada atau tidaknya ABK di suatu sekolah. Dengan mengacu pada data tersebut, Dinas Pendidikan mengeluarkan SK Sekolah Inklusi.
Peningkatan Kapasitas SDM	Untuk mempersiapkan guru-guru agar mampu menyelenggarakan pendidikan inklusi, sejak tahun 2014, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan UNESA Surabaya menyelenggarakan pendidikan inklusi selama dua semester untuk guru-guru di Lombok Tengah yang terpilih. Kegiatan ini dibiayai penuh oleh APBD. Hingga 2018, ada 30 guru yang sudah berpartisipasi di program ini.
Perkuat Kapasitas Sekolah Luar Biasa (SLB)	Di Lombok Tengah, ada 4 SLB yang dianggap sudah lebih berpengalaman dalam memberikan pendidikan untuk ABK. Meskipun koordinasi SLB saat ini di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah berinisiatif untuk melakukan beberapa upaya agar SLB dapat menjadi pusat belajar guru-guru sekolah inklusi tentang penanganan ABK dan pusat penyebaran informasi tentang ABK. Salah satu programnya adalah Guru Kunjung dimana guru di SLB diharapkan mampu melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah inklusi untuk meningkatkan kapasitas guru lainnya.

Pemahaman Aktor-Aktor tentang Pendidikan Inklusi

Meskipun deklarasi sebagai Kabupaten Inklusi sudah dilakukan lebih dari lima tahun lalu dan beberapa kebijakan serta program untuk mendukung pendidikan inklusi sudah diterbitkan, hingga studi ini dilaksanakan, masih banyak narasumber yang tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk membuat Lombok Tengah menjadi Kabupaten Inklusi. Salah satu yang tidak mengetahui detail kebijakan-kebijakan terkait inklusi adalah guru mitra INOVASI.

“Kami tidak tahu ada aturan khusus inklusi. Kami baru mendengar setelah ada pelatihan dari INOVASI yang diadakan 1 bulan yang lalu. Katanya mau jadi pilot. Katanya ada pelatihan bagi guru untuk penerapan inklusi. Ini tahunnya 1 bulan yang lalu. Kami tidak tahu pendanaan bagi ABK juga.” -Guru

Untuk sebagian yang sudah mengetahui adanya aturan tentang pendidikan inklusi, ternyata mereka pun tidak dapat menjelaskan secara detail apa yang mereka ketahui. Mereka memahami bahwa Lombok Tengah sudah menjadi Kabupaten Inklusi, namun belum benar-benar merasakan program pemerintah terkait itu. Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang guru mitra INOVASI.

“Pelaksanaan UU atau aturan tentang ABK, intinya dia bisa punya hak yang sama dengan non ABK. Kalau implementasinya belum terasa. Kita dituntut oleh pemerintah. Sampai saat ini tuntutan pemerintah terhadap kita belum terpenuhi karena fasilitas dan sarannya belum ada. Baik dari tenaga kependidikannya pun saya rasa kurang. Kalau kita-kita ini cuma tahu garis besarnya, tapi cara untuk menangani ABK (misalnya tuna rungu, tuna netra) kita tidak bisa menangani, kita belum mengerti bagaimana hurufnya tuna rungu dan brailnya.” -Guru

Dari kutipan tersebut, terlihat juga pemahaman yang dimaksud guru tentang pendidikan inklusi dimana ABK memiliki hak yang sama seperti non-ABK untuk bersekolah. Pemahaman ini juga yang menjadi temuan umum saat studi dilakukan. Narasumber memahami bahwa saat ini, ABK memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah di sekolah umum yang sudah menerapkan pendidikan inklusi, tidak harus hanya di SLB seperti sebelumnya. Guru dan kepala sekolah, khususnya di sekolah yang sudah mendapat SK sekolah inklusi, juga sudah memahami bahwa mereka harus menerima jika ada ABK yang ingin bersekolah di sekolah mereka.

Sayangnya, apa yang narasumber pahami tentang pendidikan inklusi, belum sepenuhnya menggambarkan apa yang menjadi tujuan pendidikan inklusi. Hal ini sejalan dengan temuan Mulyadi (2017) yang menunjukkan bahwa terjadi miskonsepsi tentang pendidikan inklusi di lapangan. Pendidikan ini tidak saja berhenti pada memberikan akses pada ABK untuk memperoleh hak pendidikannya, melainkan juga memastikan bahwa kebutuhan belajar mereka, yang mungkin berbeda dengan anak lainnya bisa terpenuhi. Pendidikan inklusi mendorong guru dan aktor-aktor di sekolah lainnya untuk bisa memberikan stimulus pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak.

Bagian selanjutnya membahas lebih detail tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di level sekolah. Pemahaman aktor-aktor di sekolah tentang pendidikan inklusi tercermin dari bagaimana mereka menjalankan pendidikan tersebut di sekolahnya.

Akses ABK pada Pendidikan Inklusi

Studi ini menemukan bahwa akses terhadap pendidikan bagi ABK diduga mulai meningkat beberapa tahun belakangan. Hal ini tidak lepas dari adanya larangan sekolah-sekolah untuk menolak ABK. Sama halnya dengan proses pendaftaran untuk masuk sekolah di tingkatan dasar di daerah lainnya, pemerintah Lombok Tengah tidak menyelenggarakan seleksi akademis untuk masuk sekolah negeri, maupun sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, madrasah. Selama anak memenuhi syarat administrasi, utamanya adalah usia dan lokasi rumah, anak berhak untuk memperoleh pendidikan di sekolah dimana mereka mendaftar. Hal ini

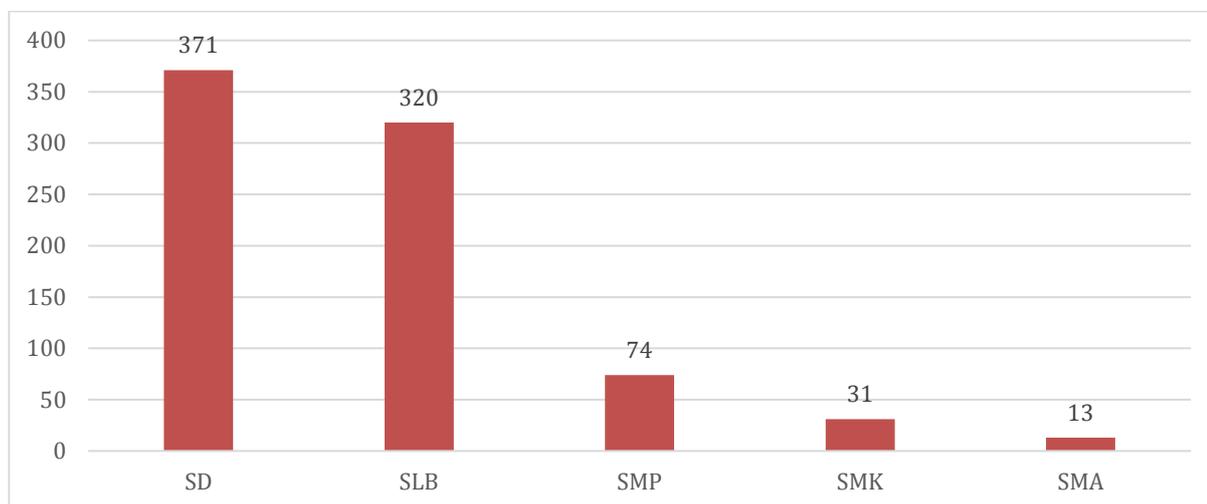
sejalan dengan UU No.8/2016 yang mengamanatkan pemerintah untuk mengutamakan ABK untuk bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Kebijakan untuk membuat sekolah-sekolah umum agar menerima ABK disyukuri oleh orang tua dengan ABK. Orang tua ABK yang terlibat dalam studi ini mengatakan bahwa saat ini mereka sudah bisa menyekolahkan anak mereka di sekolah terdekat. Hal ini merupakan pilihan yang cukup ekonomis karena lokasi SLB yang relatif jauh dari rumah. Perlu diingat bahwa mayoritas ABK berasal dari keluarga kurang mampu, yang memiliki keterbatasan biaya dan alat transportasi. Meningkatnya akses ABK pada sekolah juga bisa ditangkap melalui observasi saat studi dilakukan. Di beberapa sekolah yang menjadi target studi, ditemukan beberapa ABK. Mayoritas dari ABK merupakan anak-anak dengan kekhususan fisik, namun ada juga yang sepertinya memiliki keterbatasan fungsi mental. Wawancara dengan pengawas sekolah menunjukkan bahwa ada preferensi dari sekolah-sekolah inklusi untuk menerima anak dengan kekhususan fisik saja, sementara anak dengan keterbatasan mental tetap diarahkan ke SLB. Hal ini dikarenakan kurang siapnya sekolah untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak dengan keterbatasan fungsi mental.

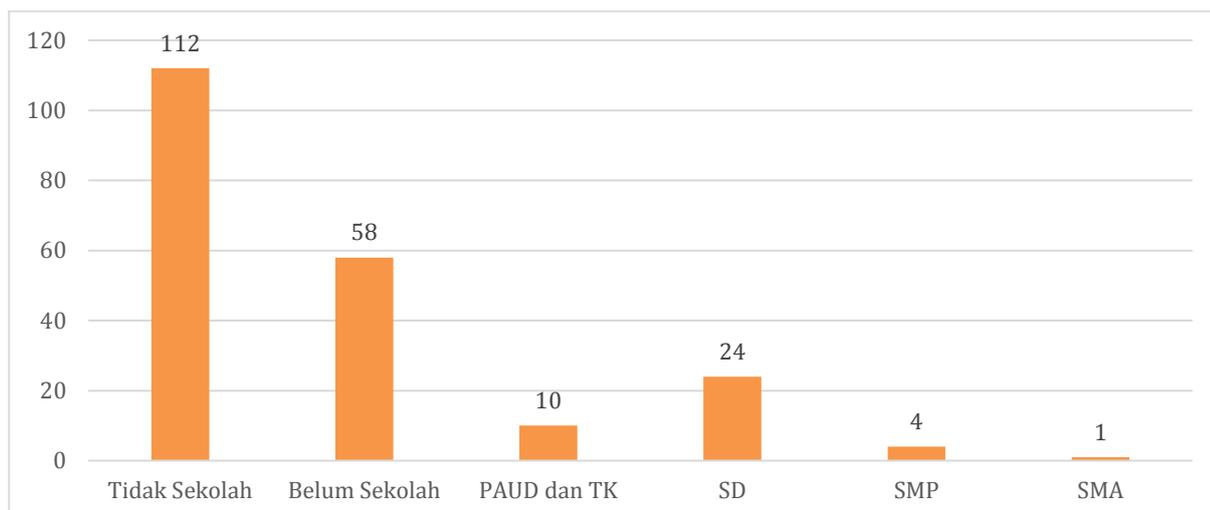
Meskipun secara umum kesempatan ABK untuk bersekolah diduga lebih tinggi belakangan ini, berdasarkan wawancara dan diskusi dengan tokoh masyarakat, masih ada ABK yang tidak bersekolah. Hal ini sejalan dengan temuan Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa masih ada anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan tidak pernah bersekolah. Selain karena kekhususan yang relatif berat, biasanya ABK yang rentan terhadap kondisi ini adalah ABK yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung, misalnya miskin, tidak memiliki orang tua, orang tua tidak sekolah, dan sejenisnya.

Sama halnya dengan pendidikan anak non-ABK, akses ABK terhadap pendidikan semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa ABK berada pada kondisi yang sangat rentan untuk putus sekolah. Menurunnya akses ABK pada pendidikan yang lebih tinggi dapat diobservasi dari Dapodik maupun data Dinas Sosial seperti yang dapat dilihat di tabel di bawah:

Tabel 11 Penyebaran ABK berdasarkan Jenjang Pendidikan (Dapodik)



Tabel 12 Penyebaran ABK berdasarkan Jenjang Pendidikan (Data Dinas Sosial)



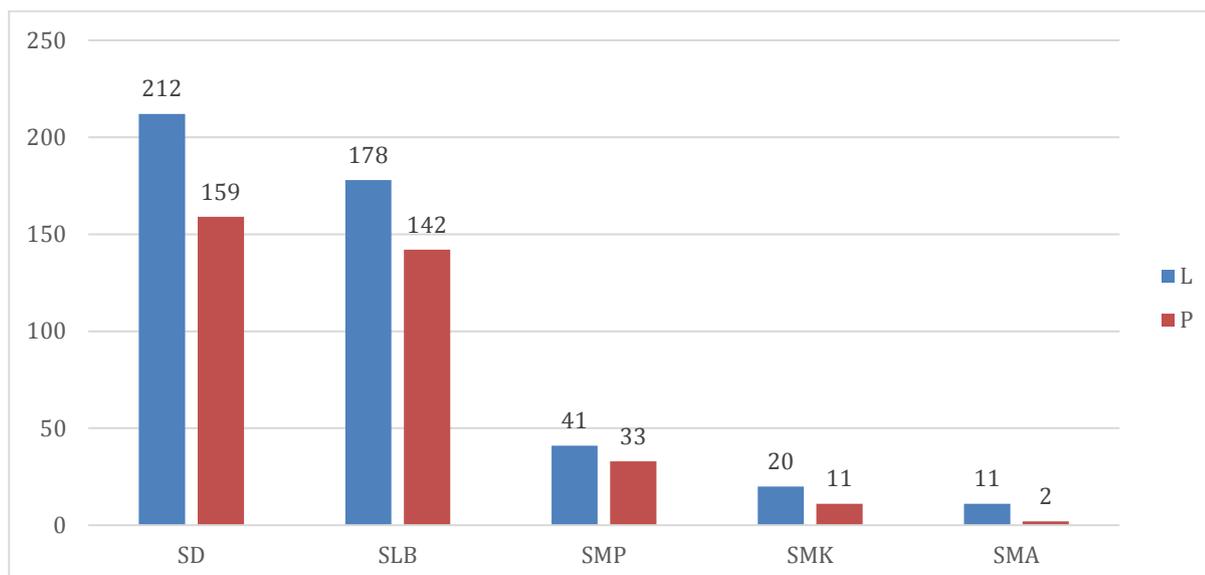
Terdapat beberapa penyebab yang diduga berpotensi menghambat akses ABK pada pendidikan lebih tinggi, yaitu:

1. Lokasi pendidikan menengah relatif lebih jauh dari rumah ABK. Keterbatasan biaya dan transportasi membuat mereka kesulitan menjangkau sekolah. Kesibukan orang tua yang tetap harus bekerja juga membuat ABK tidak ada yang mengantar ke sekolah.
2. Gangguan pada ABK yang menjadi lebih berat. Beberapa ABK yang memiliki penyakit fisik, misalnya perut dan kepala membesar, rentan untuk putus sekolah karena penyakit tersebut semakin mengganggu fungsi hidup ABK ketika umur ABK bertambah.
3. ABK tidak mampu mengikuti pelajaran karena materi menjadi lebih rumit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat ABK rentan untuk putus sekolah. Sebagian dari ABK tidak mampu lagi untuk mengikuti materi pelajaran yang menjadi makin kompleks.
4. Ada juga ABK yang berhenti sekolah untuk melanjutkan pengobatan. Biasanya beberapa kekhususan memerlukan penanganan medis yang intensif. Hal ini mengganggu jadwal sekolah ABK yang kemudian berakibat pada keputusan orang tua untuk tidak melanjutkan ABK untuk bersekolah.
5. Perundungan yang terjadi pada ABK, khususnya di sekolah, juga terkadang membuat ABK enggan untuk kembali melanjutkan sekolah.

Untuk memastikan bahwa ABK tetap dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa variabel yang sudah disebutkan di atas yang berpotensi untuk membuat ABK putus sekolah. Intervensi untuk mengatasi masalah di atas tidak bisa hanya sekedar dengan mewajibkan sekolah-sekolah untuk menerima ABK. Kebijakan-kebijakan di luar sekolah perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor non-sekolah.

Terakhir, terkait dengan gender, selama wawancara dan diskusi berlangsung, mayoritas narasumber mengatakan bahwa tidak ada perbedaan akses antara ABK laki-laki dan perempuan. Semua ABK memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Fakta ini agak berbeda dengan analisis yang dilakukan dengan menggunakan Dapodik (2018) dimana masih ada gap antara ABK laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak pendidikan.

Tabel 13 Perbedaan Partisipasi ABK pada Pendidikan berdasarkan Gender



Salah satu orang tua dari ABK, yang juga merupakan pengawas sekolah, mengatakan bahwa mungkin ada perbedaan gender di pendidikan menengah. Hal ini tidak lepas dari masih adanya pandangan di masyarakat bahwa anak laki-laki, termasuk ABK laki-laki, merupakan penerus, sehingga harus bersekolah tinggi. Jika melihat data Dapodik, makin tinggi tingkat pendidikan, maka terlihat kesenjangan gender semakin rendah. Sayangnya kesenjangan gender yang rendah ini justru disebabkan karena jumlah mereka yang mengenyam pendidikan menengah semakin mengecil.

“Tidak ada perbedaan gender untuk tataran sekolah dasar, tapi untuk sekolah yang lebih tinggi kayaknya ada. Misalnya anak lamban belajar, pasti dia akan diupayakan dilanjutkan pembelajarannya ke madrasah atau SMP (laki-laki) untuk usia di atas SD. Karena masih ada pandangan di masyarakat anak laki-laki itu penerus, jadi apapun harus dimaksimalkan. Jangankan orang yang tidak terdidik, saya misalnya, saya punya anak autis, saya mati-matian perjuangkan. Saya anak 2 perempuan dan laki-laki. Laki-laki yang autis dengan harapan ada peluang normal di atas 30 tahun.” -Pengawas Sekolah

Kualitas Pembelajaran Pendidikan Inklusi

Bagian sebelumnya sudah menjelaskan bahwa akses ABK pada pendidikan, terutama pendidikan dasar, diduga mulai meningkat. Saat ini, makin banyak sekolah-sekolah yang sudah lebih terbuka terhadap kehadiran ABK. Selain harus terus memastikan bahwa akses ABK tetap terbuka untuk bersekolah, pemerintah harus memastikan bahwa ABK yang ada di sekolah benar memperoleh pendidikan yang berkualitas. Terbukanya akses yang lebih besar tanpa kualitas yang memadai tidak akan berkontribusi banyak pada kehidupan ABK. Hal ini yang sebenarnya sangat rentan terjadi di Lombok Tengah. Beberapa ABK yang ditemui di sekolah inklusi, masih tetap tidak dapat membaca dan menulis dengan lancar, bahkan meskipun ABK sudah ada di kelas tinggi. Bagian ini membahas lebih detil bagaimana pendidikan inklusi dilaksanakan di beberapa sekolah di Lombok Tengah.

Pelaksanaan pendidikan untuk siswa ABK dan non-ABK tidak dilakukan secara terpisah, *not segregated*. Mereka digabung di satu kelas yang sama dengan guru yang sama juga. Selain karena keterbatasan ruangan dan tenaga pengajar, pemahaman bahwa pendidikan inklusi adalah menggabungkan ABK dan non-ABK mendorong guru untuk menggunakan pendekatan ini. Salah satu murid ABK mengungkapkan bahwa dirinya merasa senang jika pembelajaran bisa dilakukan bersama-sama dengan siswa non-ABK lainnya. Menurut siswa tersebut, perbedaan akan membatasi ruang gerak ABK untuk bergaul dengan non-ABK. Oleh karena itu tidak perlu ada pemisahan antara ABK dan non-ABK baik dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari.

“Kalau dipisah, aku merasa tidak betah. Aku rasa kalau aku di sekolah khusus, aku ndak nyaman” -Siswa ABK

Beberapa guru juga sudah membuat kelas menjadi lebih ramah untuk ABK. Praktik mengatur *setting* kelas yang lebih inklusi sudah dilakukan oleh guru. Misalnya adalah dengan memberikan kesempatan kepada ABK dengan *low vision* untuk duduk di bagian depan kelas. Cara ini biasanya juga dilakukan guru kepada ABK dengan kesulitan belajar agar guru dapat memberikan perhatian lebih pada ABK tersebut. Untuk membuat pembelajaran ABK menjadi lebih mudah, guru juga menciptakan lingkungan kelas yang lebih suportif. Salah satu yang dilakukan guru adalah dengan menerapkan praktik tutor sebaya, dimana anak-anak yang relatif lebih mudah untuk menangkap pembelajaran guru diminta untuk mendampingi anak-anak lain, khususnya ABK, yang masih mengalami kesulitan.

Selain belajar di tempat yang sama, baik siswa ABK maupun siswa non-ABK, juga belajar dengan menggunakan kurikulum 2013. Di beberapa sekolah, meskipun acuan pembelajaran yang digunakan sama yaitu kurikulum 2013, guru sudah menyesuaikan tingkat kesukaran pelajaran dengan kemampuan ABK. Misalnya ketika guru ingin mengajar berhitung, untuk ABK yang memiliki kesulitan belajar, latihan soal operasi hitung dibuat lebih mudah dibandingkan soal untuk siswa non-ABK.

“Ya di kelas 5 ada yang sulit belajar Matematika. Anak ini kalau kita ajarkan materi sesuai dengan teman lainnya, anak ini kurang mengerti. Kita buat bagaimana materinya disederhanakan, misal 25×25 nah anak ini belum bisa. Nah kita rendahkan angkanya 5×5 . Lalu bagaimana penyelesaiannya secara bertahap supaya anak ini nyambung lah walaupun bentuk materi yang kita berikan lebih sederhana. Karena intelegensi anak kan berbeda” -Guru

Meskipun tidak ditemukan di semua sekolah, beberapa guru juga sudah melakukan modifikasi rencana pembelajaran untuk menjawab kebutuhan ABK yang berbeda. Wawancara dengan pengawas sekolah menunjukkan bahwa untuk guru yang memiliki ABK di kelasnya, guru-guru harus menambahkan terkait cara apa yang akan dilakukan untuk menyampaikan pembelajaran. Cara ini harus dituliskan di rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Strategi lain yang juga sudah dikembangkan oleh guru di beberapa sekolah adalah membuat evaluasi pembelajaran yang lebih adil. Guru menyesuaikan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang berbeda untuk ABK, khususnya ABK dengan kesulitan belajar dan keterbatasan fungsi mental, dengan anak lainnya. Misalnya untuk anak-anak non-ABK, mereka baru dianggap lulus pelajaran Matematika jika mereka sudah berhasil menjawab 10 soal atau mendapatkan nilai minimal 70; untuk ABK target ini dibuat menjadi lebih rendah.

“Kalau kita dari segi evaluasi ya misal anak itu kita kasih 10 soal normalnya, mereka kita kasih 5 soal sampai sesuai kebutuhan anak ini. Bukan berarti anak ini KKM-nya harus sama dengan anak normal. Kita akan khususkan KKM-nya.” -Guru

Tindakan khusus yang dilakukan oleh guru kepada ABK tersebut, sayangnya, tidak dilakukan di banyak sekolah lainnya. Di beberapa tempat lainnya, keterbatasan asesmen yang tepat pada ABK membuat guru menyeragamkan pola ajar dan evaluasi pembelajaran, baik ke ABK maupun non-ABK. Adanya larangan untuk menerapkan tinggal kelas saat pergantian tahun ajaran baru, membuat banyak guru tetap menaikkan ABK tanpa standar kenaikan yang jelas. Hal ini yang mungkin berkontribusi pada fenomena ABK-ABK yang ada di kelas tinggi yang tetap tidak mampu mendemonstrasikan kompetensi siswa kelas rendah.

Penyeragaman pola ajar dan evaluasi pembelajaran yang umum ditemukan di sekolah inklusi di Lombok Tengah tidak sejalan dengan prinsip fundamental dalam pendidikan inklusi berdasarkan Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994). Menurut dokumen kesepakatan tersebut, pendidikan inklusi harus memastikan bahwa ABK dapat belajar bersama dengan siswa lainnya dan

guru menyesuaikan kebutuhan, gaya, dan kemampuan belajar siswa yang berbeda-beda berdasarkan asesmen awal yang mereka lakukan. Meskipun di beberapa sekolah sebenarnya arah menuju pendidikan inklusi sudah mulai terlihat, sayangnya, di banyak sekolah inklusi lainnya, prinsip fundamental tersebut belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Sekolah hanya menggabungkan ABK di kelas yang sama, namun pembelajaran tidak disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan ABK.

Masih rendahnya kualitas pembelajaran inklusi tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan jumlah dan mutu guru dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Saat studi dilakukan, banyak guru menyadari bahwa mereka kurang mampu untuk memberikan pendidikan terbaik untuk ABK. Selain tidak memiliki latar belakang di bidang itu, guru juga mengatakan bahwa pembekalan dari pemerintah sangat terbatas. Mereka mengeluhkan bahwa tanggung jawab baru dari pemerintah untuk menerima ABK tidak berbanding lurus dengan fasilitas serta pelatihan yang mereka dapatkan.

Salah satu yang diharapkan dapat membantu guru-guru dalam memberikan pendidikan inklusi yang berkualitas kepada ABK adalah guru KKT. Mereka adalah guru-guru yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Lombok Tengah untuk mendapatkan kuliah tanpa gelar terkait pembelajaran untuk ABK di Surabaya. Di sebagian tempat, keberadaan guru KKT memang sangat membantu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sayangnya, di tempat lainnya, ada sebagian guru KKT yang justru sudah tidak lagi menjalankan tugasnya. Mayoritas guru KKT merupakan guru honorer dengan imbalan yang relatif kecil dibandingkan guru PNS. Tidak seimbang tugas guru KKT dengan upah yang mereka dapatkan diduga membuat sebagian mereka tidak lagi menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Manfaat Pendidikan Inklusi

Meskipun pelaksanaan pendidikan inklusi di Lombok Tengah belum ideal dan masih ditemui beberapa hambatan, terdapat beberapa manfaat yang sudah dirasakan semenjak akses terhadap ABK dibuka menjadi lebih besar di sekolah-sekolah inklusi. Manfaatnya tidak saja terjadi pada ABK, melainkan juga siswa non-ABK, terutama dalam bentuk keterampilan sosial.

Untuk ABK, sekolah dianggap sebagai tempat untuk mengembangkan diri. Minimnya stimulus yang mereka dapatkan dari rumah, membuat mereka dan orang tuanya sangat bergantung pada stimulus-stimulus pendidikan yang mereka dapatkan di sekolah. Seorang ABK berprestasi mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa bersekolah karena bisa sekalian bermain dan bertemu dengan teman-teman lain. Selain untuk mengasah bakat dan kemampuan, sekolah untuk ABK juga menjadi tempat bagi ABK untuk membentuk konsep dirinya. Meskipun memiliki keterbatasan, di sekolah inklusi, ABK dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihanannya dan menyadari bahwa anak-anak lain tetap mau berteman dengan mereka.

“Di sekolah lebih banyak aktivitas, kalau di rumah cuma tidur aja.” -Siswa ABK

ABK yang mendapatkan akses pendidikan ke sekolah inklusi juga dianggap memiliki kemampuan komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik. Kemampuan mereka dalam mengatur emosi juga dianggap mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari adanya aturan-aturan di sekolah yang harus mereka patuhi. Manfaat besar lainnya bagi ABK adalah mereka menjadi lebih mandiri dan bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mereka memahami bahwa ada masa dimana mereka tidak bisa bergantung pada orang tua mereka.

Untuk siswa non-ABK, belajar bersama dengan siswa ABK juga meningkatkan keterampilan sosial mereka. Seorang pengawas sekolah menjelaskan bahwa siswa non-ABK menjadi lebih mengerti bahwa ada kehidupan-kehidupan lain yang berbeda di luar kehidupan siswa non-ABK. Ajakan guru untuk membantu siswa ABK, membuat siswa non-ABK menjadi lebih sensitif dan empati dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini mereka tunjukkan dengan memberikan bimbingan kepada teman ABK-nya yang kurang memahami materi dan mendorong kursi roda untuk mengantarkan siswa ABK pulang ke rumah.

Temuan manfaat pendidikan inklusi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Adioetomo, Mont, & Irwanto (2014) bahwa pendidikan inklusi menawarkan cara lebih efektif dalam mendidik anak. Pendidikan inklusi dianggap dapat memberikan manfaat lebih dari sekadar hasil belajar siswa, melainkan juga manfaat-manfaat sosial lainnya terutama terciptanya masyarakat yang lebih inklusi dan kohesif. Mattingly & McInerney menjelaskan bahwa pendidikan inklusi berpotensi untuk mengurangi diskriminasi. Analisis ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di Lombok Tengah berpotensi untuk berkontribusi pada terciptanya kabupaten yang lebih inklusif di Lombok Tengah.

Pendidikan Lain untuk ABK

Di Lombok Tengah, pendidikan alternatif untuk ABK sangat terbatas. ABK umumnya hanya bersekolah di sekolah inklusi dan SLB. Namun karena keterbatasan jumlah SLB, mayoritas orang tua lebih memilih sekolah inklusi. Menurut pengawas sekolah, sebenarnya ada dua sekolah lain yang juga menerima ABK, dengan kurikulum yang sudah disesuaikan dan masih relatif dekat. Sekolah yang dimaksud adalah dua sekolah level internasional dimana hanya anak-anak dari keluarga dengan sosial ekonomi atas yang dapat bersekolah di tempat itu. Meskipun tidak ada model pendidikan *homeschooling*, untuk orang tua ABK yang mampu secara finansial, ada juga di antara mereka yang memanggil guru untuk datang ke rumah dan memberikan pelajaran privat kepada anak mereka.

Jika bisa disebut sebagai pendidikan alternatif, pendidikan keagamaan cukup umum ditemui di Lombok Tengah mengingat mayoritas masyarakat Lombok Tengah beragama Islam. Selain berusaha memberikan pengetahuan agama, pendidikan model ini juga mengajarkan muridnya untuk bisa membaca Al-Quran. Biasanya, pendidikan ini dilaksanakan di luar jam sekolah. Dengan berpartisipasi di pendidikan agama, ABK diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan lancar.

“Alternatif yang paling mungkin adalah melalui pendidikan agama. Kita terobos dari situ.” -Tokoh Masyarakat

Kerja Sama antar Aktor untuk Mewujudkan Pendidikan Inklusi

Selama pengambilan data di lapangan ditemukan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan belum terjalin dengan baik. Selama ini, program pendidikan inklusi masih dianggap sebagai domain Dinas Pendidikan, meskipun Pokja Inklusi sebenarnya terdiri dari berbagai perwakilan dinas lainnya. Dari serangkaian wawancara dengan pemangku kepentingan, sepertinya hanya pegawai dari Dinas Pendidikan yang memahami benar tentang pendidikan inklusi dan apa yang mau dilakukan pemerintah Lombok Tengah terkait itu. Sementara pihak-pihak lainnya kurang memahami program-program yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi di internal pokja sangat terbatas.

“Masih kurang untuk koordinasi, karena mungkin ada program tersendiri misalnya Dinas Sosial untuk program disabilitas iya, tetapi dia tidak fokus ke pendidikan. Begitu juga ke Dinas Kesehatan kan harusnya ada hubungan. Saya kira masih kurang, saya kira belum koordinasi. Saya diundang pembuatan pokja tahun 2018, itu memang ada saya lihat ada Dinsos, Pengawas, Dinkes. Pokja itu juga tidak maksimal. Agar lebih maksimal harus sering-sering berkoordinasi, di WA grup sering memberi masukan, kekurangan, kebutuhan. Mungkin mereka sibuk. Dinas Sosial waktu bikin roadmap kan hanya duduk-duduk. Sebenarnya jika mereka menemukan 1 data, 1 keyakinan untuk bersama, tapi ini beda-beda prinsip. Karena tidak pernah berkoordinasi. Bikin perbup, tidak mengundang Dinas Sosial.” -Pemangku Kepentingan

Kutipan di atas menjelaskan bahwa meskipun selama ini sudah ada pokja, koordinasi program antar dinas tidak berjalan baik. Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan masing-masing menjalankan tugasnya tanpa banyak berkoordinasi. Dari situ juga terlihat bahwa problem terjadi karena sejak awal pembuatan aturan, beberapa dinas relevan tidak dilibatkan. Untuk memperbaiki koordinasi, pemerintah perlu kembali mengidentifikasi program-program yang dimiliki oleh masing-masing dinas dan mengembangkan alur koordinasi yang perlu dilakukan untuk setiap program.

Kurangnya koordinasi tidak saja terjadi di antara dinas-dinas di bawah pemerintah Lombok Tengah, melainkan juga dengan LSM lain yang sebenarnya juga berfokus pada pendidikan inklusi. Studi ini menemukan ada beberapa program terkait pendidikan inklusi yang dilakukan oleh LSM. Misalnya Endri Foundation yang pernah mengirimkan alat bantu kepada ABK. Selain itu, ada juga Handicap International yang pernah mengadakan pelatihan kepada guru tentang penanganan ABK dan pendidikan inklusi. Di level desa, ada yang menyertakan ABK sebagai penerima zakat. Potensi-potensi ini sebaiknya tidak diabaikan. Pemerintah perlu juga mengidentifikasi LSM-LSM yang fokus pada pendidikan inklusi untuk mensinkronisasi antara apa yang pemerintah ingin capai dengan apa yang LSM sedang atau ingin kerjakan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pendidikan Inklusi dan Kehidupan ABK

Analisis-analisis yang dilakukan di bagian sebelumnya menggambarkan bahwa kehidupan ABK, termasuk bagaimana mereka bersekolah, tidak selalu berjalan lancar. Di beberapa konteks, hambatan masih sangat umum ditemui. Bagian ini berusaha untuk menyajikan kembali faktor-faktor yang berperan dalam kehidupan ABK secara umum, dan pendidikan untuk ABK secara khusus, serta faktor yang dirasa masih menghambat untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik untuk ABK.

Komitmen pemerintah Lombok Tengah untuk membuat kabupaten ini menjadi kabupaten inklusi merupakan salah satu faktor pendukung utama. Meskipun reformasi berjalan lambat, adanya komitmen dari pemerintah sudah berhasil mendorong untuk dibuatnya beberapa aturan serta program yang berkaitan dengan kehidupan ABK, termasuk membuat lebih banyak sekolah-sekolah di Lombok Tengah menjadi lebih inklusi.

Faktor lain yang dianggap mendukung adalah mulai berkurangnya pandangan negatif masyarakat tentang ABK. Sikap yang lebih positif terhadap keberadaan ABK merupakan modal awal untuk membangun lingkungan yang lebih suportif kepada ABK. Akhirnya kondisi ini dapat mengurangi rasa malu orang tua yang memiliki ABK untuk bisa mengirimkan anaknya ke sekolah. Meskipun masih ada beberapa cerita tentang ABK yang tidak mendapatkan kesempatan sekolah, analisis di bagian sebelumnya menunjukkan trend bahwa saat ini ABK sudah bisa lebih umum ditemui di sekolah, terutama ABK dengan keterbatasan fisik.

Keberadaan beberapa LSM lokal, maupun internasional di Lombok Tengah, yang juga memiliki fokus pada peningkatan hidup ABK merupakan faktor pendukung yang juga harus dimanfaatkan lebih jauh. Program LSM, termasuk program INOVASI, yang fokus pada peningkatan kapasitas guru, harus dibuat sejalan dengan apa yang pemerintah harapkan dengan kehidupan ABK di Lombok Tengah.

Seperti halnya implementasi kebijakan lainnya, upaya pemerintah untuk mewujudkan Lombok Tengah sebagai kabupaten inklusi, masih menemui beberapa faktor yang dianggap menghambat. Beberapa kebijakan yang sudah dibuat, tidak terimplementasi dengan baik karena minimnya koordinasi baik di internal Pokja Inklusi maupun antar lembaga lain, di luar pemerintah. Selain terbatasnya koordinasi soal program, antar lembaga juga tidak banyak berkoordinasi soal data ABK yang mereka miliki. Saat studi ini dilakukan, kebanyakan narasumber tidak mengetahui data-data ABK yang ada di Lombok Tengah.

Hambatan lain yang umum ditemui adalah tidak seimbang upaya pemerintah membuka akses yang seluas-luasnya pada ABK untuk bersekolah dengan penyediaan program yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas. Setiap tahun, semakin banyak sekolah yang ditunjuk pemerintah menjadi sekolah inklusi. Sayangnya, masih banyak guru yang mengeluhkan bahwa persiapan yang mereka dapatkan dari pemerintah sangat terbatas. Bahkan ada guru yang menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima pelatihan dari pemerintah.

Pelatihan yang sangat minim membuat kualitas guru untuk melaksanakan pendidikan inklusi menjadi sangat terbatas. Tidak heran jika kemudian di beberapa sekolah, ditemukan ABK yang hanya duduk di dalam kelas namun tidak mengikuti pelajaran. Ini adalah akibat dari terbukanya akses, namun tidak disertai dengan upaya peningkatan kualitas guru dan kapasitas sekolah, melalui penyediaan fasilitas. Inisiatif pemerintah untuk menyediakan guru KKT, yang sudah dibekali dengan pendidikan penanganan ABK, tidak banyak

membantu karena keterbatasan jumlah mereka dan distribusi yang kurang merata. Minimnya insentif untuk guru KKT yang merupakan guru honorer juga mendemotivasi guru KKT untuk menjalankan tugasnya.

Selain masih belum fokus pada peningkatan kualitas, program terkait pendidikan inklusi di Lombok Tengah juga dapat dikatakan terlambat karena lebih banyak fokus pada pendidikan dasar. Studi ini dilakukan juga dengan melibatkan stakeholder pendidikan di level anak usia dini dan sederajat. Data menunjukkan bahwa program pendidikan inklusi untuk level PAUD-sederajat sangat terbatas dan tidak ada koordinasi antara PAUD-sederajat dengan level pendidikan di atasnya. Intervensi yang terlambat pada ABK ini berpotensi untuk membuat ABK menjadi lebih rentan.

Selain hambatan-hambatan yang erat kaitannya dengan variabel sekolah, ada juga beberapa hambatan terkait dengan faktor non-sekolah. Misalnya adalah keterbatasan tenaga profesional di Lombok Tengah yang dapat melakukan asesmen kepada ABK sejak dini, misalnya dokter anak dan psikolog. Keterbatasan ini membuat orang tua dengan ABK terkadang harus mengakses pengobatan tradisional yang belum bisa dijamin akurasinya dalam melakukan diagnosis. Sebagian orang tua juga memilih pendekatan religius untuk mengobati ABK. Meskipun di satu sisi, pendekatan tersebut meningkatkan penerimaan orang tua pada kondisi ABK yang terbatas, cara ini tidak dapat mengatasi masalah medis yang mungkin lebih banyak ada di ABK.

Terakhir, faktor penghambat yang tidak bisa diabaikan adalah keterbatasan ekonomi orang tua ABK. Di beberapa konteks, faktor ini merupakan penyebab utama dari ABK untuk putus sekolah. Sayangnya, tidak semua ABK dengan latar belakang ekonomi kurang mampu bisa mendapatkan bantuan baik untuk sekolah, pengobatan, dan kehidupan sehari-hari. Sebagian ABK memang sudah ada yang memiliki BPJS dan merupakan penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), namun masih ada juga yang belum menerima bantuan-bantuan tersebut.

5. PENUTUP

“Di Gemel saya jumpai, anak kelas 6 hanya bisa membaca 7 huruf. Tetapi kalau disuruh menulis, nggak bisa dia.” -Pengawas Sekolah

Kutipan di atas menggambarkan salah satu kesimpulan utama dari studi tentang ABK di Lombok Tengah. Meskipun akses untuk pendidikan ABK lebih terbuka belakangan ini, pelaksanaan pendidikan inklusi di lapangan masih jauh dari sempurna. Temuan ini mengonfirmasi studi yang pernah dilaksanakan oleh Mulyadi (2017), Poernomo (2016), Wibowo & Muin (2016), Adioetomo, Mont, & Irwanto (2014) yang juga menemukan bahwa implementasi pendidikan inklusi masih memiliki tantangan-tantangan besar. Bagian ini menyampaikan kembali kesimpulan dari studi yang dilakukan dengan melibatkan siswa non-ABK, siswa ABK, orang tua dengan ABK, tokoh masyarakat, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pemangku kepentingan sebagai narasumber.

5.1 KESIMPULAN

Baik data sekunder maupun data yang didapatkan melalui wawancara dan diskusi menunjukkan bahwa terdapat ABK di Lombok Tengah, dengan kekhususan yang cukup beragam. ABK dengan keterbatasan fisik lebih umum diidentifikasi oleh narasumber. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cenderung belum mampu untuk menggunakan pendekatan sosial dalam memahami ABK. Pemahaman warga sekolah, khususnya guru lebih dalam tentang ABK dibandingkan narasumber lainnya. Mereka memahami bahwa ABK meliputi juga anak-anak dengan kesulitan belajar dan anak-anak dengan bakat tertentu.

Terkait dengan sikap terhadap ABK, meskipun masih ditemui pandangan dan sikap negatif, misalnya perundungan pada ABK dan label negatif seperti idiot, secara umum sikap narasumber dianggap sudah

lebih menerima kehadiran ABK, baik di sekolah maupun masyarakat. Penerimaan terhadap ABK tidak lepas dari pemahaman magis yang ada di masyarakat terkait kondisi kekhususan ABK. Banyak dari masyarakat, termasuk orang tua, merasa bahwa ABK merupakan takdir Tuhan yang harus diterima.

Menyadari bahwa ABK memiliki keterbatasan, tidak lantas membuat orang tua dengan ABK memiliki harapan yang rendah terhadap ABK. Sebagian dari mereka tetap memiliki harapan yang tinggi kepada ABK, misalnya ABK bisa lebih mandiri dan mencari nafkah ketika sudah besar. Harapan yang tinggi ini yang mendorong orang tua dengan ABK berusaha untuk memenuhi hak-hak ABK, terutama hak untuk bermain, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pengobatan, dan hak untuk belajar. Sayangnya, di beberapa kondisi, latar belakang keluarga yang kurang beruntung dan lingkungan yang kurang suportif membuat ABK tidak dapat mendapatkan hak tersebut.

Terkait pemenuhan hak, meskipun seluruh narasumber tidak memahami hak-hak ABK, baik yang ada di CRPD maupun UU No.8/2016, mereka menyadari bahwa ABK memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Terdapat beberapa hak yang mereka sebutkan seperti hak untuk berinteraksi dengan anak lainnya, hak mendapatkan kasih sayang, hak bermain, dan hak memperoleh pendidikan. Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi ABK, dilakukan pemerintah Lombok Tengah dengan memperbanyak sekolah inklusi dan mengambil beberapa kebijakan terkait pendidikan inklusi. Kebijakan ini dianggap dapat memperluas akses ABK pada pendidikan. Manfaat implementasi pendidikan inklusi tidak hanya dirasakan oleh ABK dalam bentuk meningkatnya kemampuan akademis, pengaturan emosi, dan kemampuan bersosialisasi, namun juga dirasakan oleh siswa non-ABK dalam bentuk meningkatnya keterampilan sosial dan empati kepada anak-anak dengan kondisi berbeda.

Sayangnya, hingga studi ini dilakukan, upaya pemerintah masih sebatas meningkatkan akses ABK pada sekolah, belum banyak fokus pada peningkatan kualitas pendidikan inklusi. Guru mengeluhkan minimnya pelatihan dan fasilitas yang mereka dapatkan dari pemerintah untuk memberikan pendidikan yang relevan ke ABK. Kondisi ini yang membuat pendidikan inklusi menjadi sekadar pendidikan terintegrasi dimana ABK digabung dengan anak-anak lainnya, namun guru di kelas tidak mengajar sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.

Selain belum fokus dengan kualitas, kendala lain dalam implementasi pendidikan inklusi adalah koordinasi yang masih belum intens dilakukan antar dinas dan lembaga yang ada di Lombok Tengah, yang membuat setiap organisasi masih bekerja sendiri-sendiri. Program pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat non-sekolah dianggap juga masih sangat minimal. Beberapa ABK masih kesulitan mendapatkan pengobatan berkualitas dan belum menerima bantuan sosial untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun demikian, studi ini juga menemukan beberapa faktor pendukung yang perlu dimanfaatkan lebih jauh. Misalnya, komitmen pemerintah untuk mewujudkan Lombok Tengah sebagai kabupaten inklusi. Selain itu, di Lombok Tengah sudah ada beberapa LSM lain yang fokus pada pendidikan inklusi. Terakhir, masyarakat, terutama orang tua sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan untuk ABK. Ketiga hal ini merupakan modal kuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah untuk ABK.

5.2 REKOMENDASI

Studi ini berusaha untuk mengeksplorasi kehidupan ABK di Lombok Tengah, mulai dari keberadaannya, sikap masyarakat terhadap ABK, hingga bagaimana hak-hak ABK, terutama pendidikannya, bisa terpenuhi. Meskipun secara umum, kondisi saat ini dianggap lebih baik oleh narasumber, masih ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Bagian ini berusaha untuk memberikan rekomendasi tentang perbaikan yang masih perlu dilakukan. Mengingat masalah ABK tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengintervensi faktor sekolah, rekomendasi juga akan menyoroti faktor-faktor lain di luar sekolah.

Di level pemangku kepentingan, ada dua hal yang perlu diperbaiki yaitu kebijakan dan koordinasi. Terkait dengan kebijakan, sesuai dengan masalah yang sudah digambarkan di atas, pemerintah sudah harus mulai mengembangkan kebijakan yang fokusnya pada penguatan ideologi inklusi dan peningkatan kualitas sekolah inklusi. Pemerintah sebaiknya mengembangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan tahapan kegiatan pelaksanaan yang jelas dan disertai indikator capaian yang terukur dalam bentuk Peraturan Bupati.

Pengiriman guru honorer untuk memperoleh pendidikan tambahan non-gelar bisa membantu untuk mengatasi masalah terbatasnya tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan tentang ABK. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan lanjutan tentang bagaimana mereka bisa berkontribusi setelah memperoleh pendidikan tambahan. Beberapa yang bisa dilakukan pemerintah misalnya adalah dengan mengangkat guru KKT menjadi guru honor daerah, menjadikan mereka sebagai fasilitator untuk guru-guru lain sehingga guru lain juga meningkat kapasitasnya, memastikan bahwa jam mengajar guru KKT dapat dihitung di Dapodik, dan yang terpenting adalah mengembangkan sistem untuk memastikan bahwa guru KKT benar-benar menjalankan tugasnya untuk membantu proses pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah.

Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program untuk level PAUD-sederajat. Intervensi sedini mungkin dapat mencegah kerentanan yang lebih besar pada ABK. Selama ini, program untuk ABK di pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah merekrut guru PAUD untuk mengikuti KKT, bekerja sama dengan Posyandu, dan perangkat yang ada di desa. Jika memungkinkan, pemerintah dapat mendorong pemerintah level desa untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih ramah terhadap ABK. Misalnya dengan melakukan pendataan ABK di level desa sedini mungkin, sebelum anak masuk sekolah dan mengalokasikan dana desa untuk kebutuhan hidup ABK, selama ABK belum terdaftar di sekolah.

Kebijakan yang baik, tidak bisa diterapkan dengan baik apabila tidak ada koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, rekomendasi berikutnya di level pemangku kepentingan adalah perbaikan koordinasi antar lembaga, terutama lembaga yang terlibat di Pokja Inklusi. Ada beberapa koordinasi yang penting untuk diperbaiki. Pertama, koordinasi program antar organisasi perlu ditingkatkan. Pokja perlu melakukan identifikasi program-program dinas terkait untuk melakukan sinkronisasi. Selain itu, Pokja juga perlu melibatkan LSM di tingkat lokal yang berpotensi untuk dapat membantu pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas layanan disabilitas di sekolah dan masyarakat. Akan sangat baik jika program-program yang ada bisa saling mendukung satu sama lain dan tidak saling tumpang tindih.

Selanjutnya adalah koordinasi data. Di bagian awal sudah dijelaskan bahwa ada dua data utama yang dimiliki oleh kabupaten Lombok Tengah terkait penyebaran ABK, yaitu Dapodik dan data dari Dinsos. Sayangnya, kedua data ini menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melakukan pengambilan data. Koordinasi antar Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial perlu dilakukan agar penggunaan kedua data tersebut bisa saling mendukung satu sama lain. Terakhir, pertemuan rutin yang harus dilakukan oleh Pokja Inklusi untuk membahas isu-isu terkini terkait ABK dan kemajuan yang sudah dicapai.

Di level satuan pendidikan, penguatan pusat-pusat pendidikan inklusi misalnya dengan memanfaatkan SLB yang sudah lama berdiri harus terus dilakukan. Selama ini guru dan kepala sekolah masih kesulitan untuk mengakses sumber-sumber yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka dan informasi layanan khusus bagi siswa, termasuk kesehatan, alat bantu, dan kebutuhan khusus lainnya. Memastikan bahwa pelaksanaan kelompok kerja guru (KKG) yang fokus pada isu pendidikan inklusi juga perlu dilakukan. Guru KKT, guru di SLB, dan pengawas sekolah merupakan tiga aktor kunci yang dapat mendukung untuk membuat KKG lebih bermanfaat untuk peningkatan pemahaman guru terkait pendidikan inklusi.

Salah satu pemahaman krusial guru yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan mereka dalam melakukan identifikasi kekhususan pada ABK. Mereka perlu dibantu oleh tenaga-tenaga profesional dalam melakukan asesmen. Hal ini menjadi krusial karena asesmen awal akan mempengaruhi intervensi yang diberikan oleh guru. Jika tenaga profesional masih sangat minim, maka beban asesmen yang terkait dengan fungsi mental

sebaiknya dihapuskan dari tanggung jawab guru karena guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan itu. Asesmen sebaiknya dibuat pada fungsi-fungsi yang dapat diamati oleh guru dan masih terkait dengan proses pembelajaran.

Di level desa dan masyarakat, mengingat kebanyakan ABK berasal dari keluarga kurang mampu, maka perlu dipastikan bahwa ABK tersebut menerima bantuan-bantuan sosial, misalnya BPJS, terdaftar sebagai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sejenisnya. Hak-hak ABK terhadap itu dijamin juga di dalam UU No.8/2016. Untuk itu, perangkat desa harus memiliki data akurat terkait keberadaan ABK diwilayahnya dan menggunakan data tersebut untuk intervensi. Seperti yang sudah disampaikan di atas, identifikasi dini terhadap keberadaan ABK sudah harus mulai dilakukan oleh perangkat desa sejak anak belum masuk ke sekolah dasar.

Hal lain yang bisa diupayakan untuk mendorong perubahan perilaku di semua lapisan pemangku kepentingan, masyarakat, dan pemerintah adalah dibentuk dan dikembangkannya Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap institusi ataupun organisasi masyarakat. Dengan memiliki ULD maka masyarakat dan pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek inklusi di setiap kegiatannya.

5.3 PILOT SETARA SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI

Lombok Tengah, merupakan satu-satunya kabupaten mitra INOVASI, dimana pilot inklusi-disabilitas (SETARA) diimplementasikan. Program ini sudah dilaksanakan sejak 2018 dan masih berlanjut hingga saat ini. Implementasi pilot SETARA sejalan dengan agenda pemerintah kabupaten Lombok Tengah untuk mendorong pendidikan inklusi, terutama di level SD. Program ini terlaksana dengan melibatkan fasilitator lokal, yang merupakan aktor pendidikan di Lombok Tengah, dengan harapan program ini dapat terus berlanjut meskipun INOVASI sudah berakhir masa tugasnya.

Terdapat beberapa kegiatan utama dari pilot SETARA. Pertama adalah mengembangkan modul khusus pendidikan inklusi dan penanganan ABK. Modul ini bertujuan untuk menambah pemahaman guru tentang ABK dan pendidikan inklusi yang diharapkan mampu meningkatkan keterampilan mereka dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Berdasarkan temuan studi di atas, pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru mengingat kesempatan yang mereka dapatkan dari pemerintah terkait pengembangan kapasitas sangat terbatas.

Kedua adalah mengembangkan profil belajar siswa (PBS), yaitu sebuah alat asesmen yang dapat digunakan guru untuk menilai fungsi-fungsi tertentu pada anak yang terkait dengan kegiatan belajar. Alat ini tidak digunakan untuk mengklasifikasikan kekhususan siswa, baik medis maupun psikologis, seperti yang terdapat di Dapodik saat ini. Oleh karena itu, instrumen ini relatif lebih mudah untuk digunakan oleh guru. Pengembangan instrumen ini dilakukan dengan mengacu pada Washington Group Child Functioning Module yang juga digunakan oleh UNICEF.

Mengingat terbatasnya tenaga medis dan psikolog di Lombok Tengah, PBS dapat menjawab kebutuhan guru-guru, khususnya di sekolah inklusi, untuk dapat melakukan asesmen dengan lebih mudah. Hasil asesmen ini dapat digunakan guru untuk mendesain skenario pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Dari sini, diharapkan bahwa pendidikan di Lombok Tengah benar-benar dapat berjalan inklusif dan tidak sebatas terintegrasi.

Selanjutnya, pilot SETARA juga mengembangkan beberapa modul pendidikan inklusi yang relevan untuk digabungkan dengan materi pilot literasi. Modul ini diharapkan mampu membantu guru untuk memahami bahwa pendekatan yang lebih inklusi dapat dilakukan di berbagai materi pelajaran, baik itu literasi, numerasi, maupun lainnya. Pengembangan modul ini tidak lepas dari usaha INOVASI untuk membuat isu inklusi menjadi isu yang dapat di-*mainstreaming*kan ke semua konteks.

Hingga laporan ini dibuat, belum ada analisis serta evaluasi sistematis yang dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana pilot SETARA berhasil meningkatkan kapasitas guru-guru di Lombok Tengah tentang ABK dan pendidikan inklusi. Proses monitoring, melalui spotcheck masih sedang dilaksanakan. Namun, studi ini mengindikasikan bahwa pilot SETARA yang diimplementasikan oleh INOVASI sudah membantu guru-guru untuk mengenal apa yang sebenarnya dimaksud dengan pendidikan inklusi. Pengembangan PBS juga dianggap membantu guru dalam mengembangkan asesmen awal pada siswa-siswa dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK.

Pilot SETARA, tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang sudah dibahas sebelumnya. INOVASI masih perlu memastikan bahwa pilot ini bisa melibatkan lebih banyak guru, termasuk guru-guru di level PAUD-sederajat dan aktor-aktor lokal lainnya, terutama aktor LSM yang bekerja di isu ini. Isu keberlanjutan program juga masih perlu dipertimbangkan. Penguatan fasilitator dan sistem diseminasi harus dilakukan sebagai dua modal utama untuk melanjutkan program. Untuk memastikan ini terus berlanjut, INOVASI perlu mendorong bahwa pelaksanaan pilot SETARA dan kegiatan-kegiatan relevan lainnya dapat menjadi agenda pembangunan di Lombok Tengah. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi pengembangan roadmap pendidikan inklusi. Hal ini dibahas lebih detil di bagian selanjutnya.

5.4 PENGEMBANGAN ROADMAP PENDIDIKAN INKLUSI

Salah satu kendala utama yang menghambat implementasi pendidikan inklusi di Lombok Tengah adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Selama ini, hanya Dinas Pendidikan yang sepertinya memahami agenda pendidikan inklusi di kabupaten. Hal tersebut dapat terlihat dalam ungkapan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan pemerintah selain Dinas Pendidikan, terkait dengan pemahaman pendidikan inklusi sebagai layanan yang melibatkan lintas sektor. Pokja Inklusi yang sebenarnya terdiri dari banyak perwakilan lembaga belum banyak berkontribusi. Hal ini mengakibatkan masing-masing organisasi bekerja sendiri-sendiri, termasuk lembaga-lembaga swadaya yang bekerja atas inisiatif sendiri.

Untuk mengatasi hal itu, INOVASI berupaya memfasilitasi pemerintah kabupaten mengembangkan *roadmap* pendidikan inklusi di Lombok Tengah. Selain menggambarkan apa yang pemerintah ingin capai, serta target-target detil di dalamnya, dokumen ini juga menggambarkan koordinasi lembaga serta sinkronisasi program antar organisasi untuk mencapai target-target yang dimaksud.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam pengembangan *roadmap* pendidikan inklusi yang hingga saat ini masih dilakukan, yaitu:

1. Masalah harus didefinisikan secara jelas melalui metode terstruktur dengan melibatkan aktor-aktor relevan.
2. Pengembangan road map harus melibatkan berbagai dinas dan organisasi terkait dengan melakukan identifikasi awal terkait peran dan kontribusi masing-masing organisasi.
3. Pendidikan inklusi harus berlangsung di seluruh level pendidikan dan dimulai sedini mungkin.
4. Pengembangan program harus mempertimbangkan faktor-faktor non-sekolah yang dianggap kritical pada kehidupan ABK.
5. Program harus memiliki capaian dan target yang operasional serta menggambarkan bagaimana capaian program tersebut dapat dievaluasi.

Roadmap ini diharapkan mampu mengatasi beberapa faktor penghambat implementasi pendidikan inklusi yang terjadi di level pemangku kepentingan. Sosialisasi di awal dan pertemuan rutin untuk membahas implementasi *roadmap* adalah dua hal penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa *roadmap* benar-benar dilaksanakan dan tidak hanya sekadar sebagai sebuah dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih, Daniel Mont, and Irwanto. 2014. *Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection*. Depok: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Cameron, L., & Suarez, D. C. (2017). *Disability in Indonesia: What We Learn from the Data*. Melbourne: Monash Business School.
- Griffith, Kimberly G., Mark J. Cooper, and Ravic P. Ringlaben. 2002. "A Three Dimensional Model for the Inclusion of Children with Disabilities." *Electronic Journal for Inclusive Education* 1-9.
- INOVASI. 2018. *Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Strategy*. Jakarta: INOVASI.
- Mattingly, Jacqui, and Laura McInerney. n.d. *Guidance Note: A DFID Practice Paper*. Department for International Development.
- Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin. 2017. "Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia." *Policy and Governance Review* 201-212.
- Peters, Susan, C. Johnstone, and P. Ferguson. 2007. "A Disability Rights in Education Model for Evaluating Inclusive Education." *International Journal of Inclusive Education* 139-160.
- Purwanta, S. A. (2018, November). *Konsep Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Yogyakarta, Indonesia.
- Poernomo, Baby. 2016. "The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Current Problems and Challenges." *American International Journal of Social Science* 144-150.
- Suparno. 2008. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Tsaputra, Antoni. n.d. "Inclusive Education for Children with Disabilities In Indonesia: Dilemma and SuiTabel Framework for Indonesia Context."
- Wibowo, Satrio Budi, and Juhri Abdul Muin. 2016. "Inclusive Education in Indonesia: Equality Education Access for Disabilities." *The 1st International Conference on South East Asia Studies*. KnE Social Sciences. 484-493.
- World Health Organization & World Bank. 2011. "World Report on Disability." Geneva, Switzerland: World Health Organization.